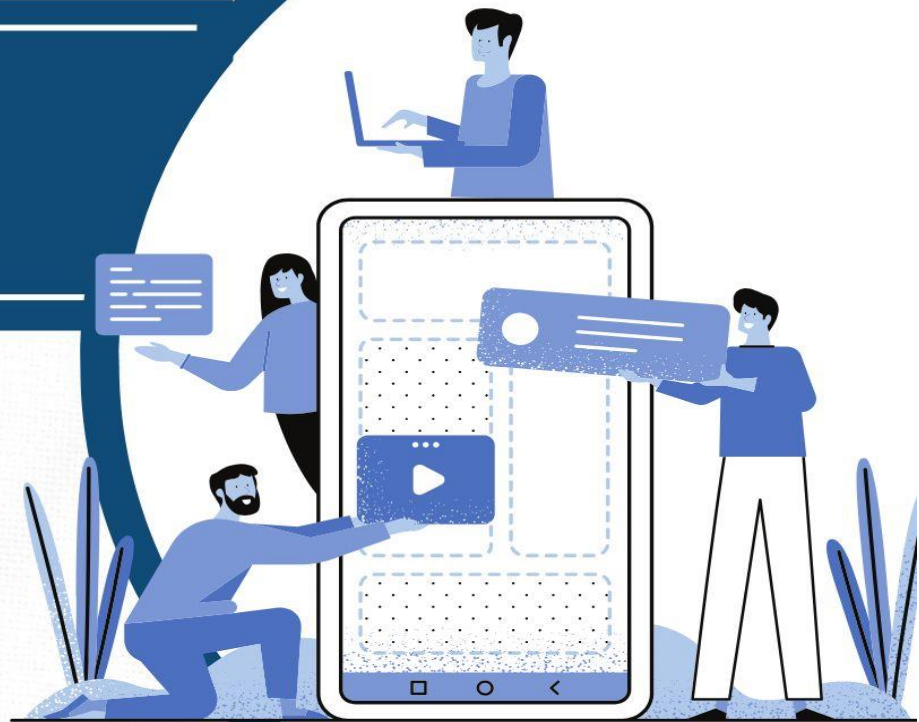




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025



DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata DKPPP dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJiP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 sebagai informasi kinerja yang terukur selama 1 tahun yang telah dan seharusnya dicapai untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, Melalui penyusunan LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah.

Demikian LKJiP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Temanggung, Maret 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KAB. TEMANGGUNG



JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197106301998031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Struktur Organisasi.....	4
3.1 Sumber Daya DKPPP.....	5
3.1.1 Sumber Daya Manusia.....	5
3.1.2. Asset / Modal.....	6
4. Isu-isu Strategis.....	7
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP	7
1. Dasar Hukum.....	7
2. Tujuan LKJiP.....	8
3. Manfaat LKJiP.....	8
C. SISTEMATIKA LKJiP	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana strategis.....	11
1. Visi	11
2. Misi	11
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
C. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Akuntabilitas Keuangan.....	102
BAB IV PENUTUP.....	135

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	135
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan Dan Jabatan Tahun 2025	5
Tabel 1.2	Sarana Dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) RPJMD Tahun 2025 – 2029 untuk Tahun Ke - 1 (2025)	14
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025-2029	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	16
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Tahun 2025	17
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	17
Tabel 2.6	Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	21
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Tujuan DKPPP 2025-2029.....	22
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tujuan dengan Regional, Provinsi dan Nasional Tahun 2025	23
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	24
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian Regional, Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	25
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian 5 tahun terakhir	25
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2025.....	29
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Prevalensi Ketidakcukupan pangan (PoU) Regional, Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	30
Tabel 3.9	Realisasi Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025.....	30

Tabel 3.10	Realisasi Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025.....	
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	34
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi Angka Konsumsi Ikan Regional, Provinsi dan Nasional tahun 2025.....	34
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi Angka Konsumsi Ikan Regional, Provinsi dan Nasional tahun 2025	36
Tabel 3.14	Daftar bantuan paket Gemarikan	37
Tabel 3.15	Realisasi Angka Konsumsi Ikan Kab Temanggung tahun 2021-2025	40
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Tahun 2025	43
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Skor Pola Pangan harapan Tahun 2025.....	43
Tabel 3.18	Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung, Tahun 2021-2025	46
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Regional, Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	
Tabel 3.20	Capaian Kinerja persentase penanganan kerawanan pangan Tahun 2025.....	47
Tabel 3.21	Capaian Kinerja persentase penanganan kerawanan pangan Tahun 2021-2025	47
Tabel 3.22	Capain Kinerja Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar Tahun 2025.....	51
Tabel 3.23	Rekapitulasi capaian kinerja Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar Tahun 2021-2025	52
Tabel 3.24	Capaian kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025	55
Tabel 3.25	Daftar pemberian bantuan benih ikan untuk restocking ikan Tahun 2025	56
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun 2025.....	58
Tabel 3.27	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2021-2025	58

Tabel 3.28	Daftar pemberian bantuan benih dan sarana prasarana budidaya ikan Tahun 2025	61
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025	63
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2025	67
Tabel 3.31	Capaian Jumlah produksi pengolahan ikan 2021-2025	68
Tabel 3.32	Daftar Penerima Sarana Pengolahan hasil perikanan tahun 2025.....	69
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian Tahun 2025.....	73
Tabel 3.34	Tabel produksi, produktivitas dan luas panen Tanaman Pangan Tahun 2020-2025.....	74
Tabel 3.35	Perbandingan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Tingkat Regional	78
Tabel 3.36	Tabel produksi, produktivitas dan luas panen komoditas hortikultura Tahun 2020-2024.....	79
Tabel 3.37	Perbandingan Produksi Komoditas Hortikultura tahun 2025 tingkat Regional	84
Tabel 3.38	Tabel produksi, produktivitas dan luas panen komoditas Perkebunan Tahun 2020-2025	85
Tabel 3.39	Tabel Perbandingan Produksi Komoditas Perkebunan Tingkat Regional.....	87
Tabel 3.40	Tabel produksi komoditas Peternakan Ruminansia Tahun 2020-2024	88
Tabel 3.41	Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025.....	90
Tabel 3.42	Tabel produksi komoditas Peternakan Ruminansia Tahun 2020-2024.....	92
Tabel 3.43	Capaian kinerja Jumlah produksi ternak unggas dan jumlah produksi telur tahun 2025.....	93
Tabel 3.44	Jumlah Produksi Ternak Unggas Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	93

Tabel 3.45	Jumlah Produksi Telur Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	94
Tabel 3.46	Tabel produksi komoditas Peternakan Unggas Tahun 2020-2024.....	95
Tabel 3.47	Tabel Persentase kelahiran pedet Tahun 2021-2025.....	97
Tabel 3.48	Capaian Kinerja Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	101
Tabel 3.49	Data Rekapitulasi Bantuan Prasarana Irigasi Usaha Tani Tahun 2025.....	102
Tabel 3.50	Realisasi Persentase Penanganan penyakit Hewan Tahun 2020-2025	105
Tabel 3.51	Rekapitulasi Data Penyakit Hewan Tahun 2025	107
Tabel 3.52	Realisasi Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Tahun 2020- 2025	110
Tabel 3.53	Sampel Organ Hati.....	112
Tabel 3.54	Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Tahun 2025	115
Tabel 3.55	Tabel Realisasi Persentase Pengendalian Bencana pertanian Tahun 2020-2025	116
Tabel 3.56	Capaian Kinerja Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi.....	119
Tabel 3.57	Realisasi Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi Tahun 2020-2025	119
Tabel 3.58	Rekapitulasi Penilaian Penerapan Teknologi Modern Tahun 2025	119
Tabel 3.59	Capaian Kinerja Program Penyuluhan Pertanian.....	122
Tabel 3.60	Realisasi Persentase kelompok tani yang naik kelas Tahun 2025	123
Tabel 3.61	Rekapitulasi Kelompok tani yang naik kelas Tahun 2025.....	124
Tabel 3.62	Alokasi dan Realisasi anggaran DKPPP Tahun 2025.....	127
Tabel 3.63	Analisa Efisiensi.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung	5
Gambar 3.1	Kegiatan Pengubinan Jagung Program Bantuan Benih Jagung Varietas Pertiwi 3 dan P-35.....	28
Gambar 3.2	Gerakan pangan untuk stabilisasi harga dan bantuan pangan kepada masyarakat.....	33
Gambar 3.3	KIE dan Sosialisasi Gemarikan	39
Gambar 3.4	Pengubinan padi	42
Gambar 3.5	Sosialisasi B2SA di Pondok Pesantren	46
Gambar 3.6	Bantuan pangan ke Masyarakat	50
Gambar 3.7	Pemberian bantuan untuk restocking ikan di perairan terbuka	
Gambar 3.8	Bantuan sarpras perikanan untuk kelompok pembudidaya	62
Gambar 3.9	Jemput bola pembinaan kelompok usaha perikanan.....	66
Gambar 3.10	Penyerahan Bantuan Freezer untuk Poklahsar	71
Gambar 3.11	Panen raya Serentak Kuartal III.....	78
Gambar 3.12	Panen Bawang putih dan bawang merah.....	84
Gambar 3.13	Gerakan pengendalian OPT Tembakau.....	88
Gambar 3.14	Bantuan alat mesin pertanian.....	100
Gambar 3.15	Bantuan bibit tembakau.....	100
Gambar 3.16	Pembangunan Jaringan irigasi usaha tani.....	104
Gambar 3.17	Kegiatan vaksin, pemeriksaan kesehatan hewan, penyerahan bantuan obat dan vitamin untuk sapi serta pengawasan produk asal hewan.....	114
Gambar 3.18	Gerdal OPT Tanaman Hortikultura.....	118
Gambar 3.19	Rembug tani pada Kegiatan Sekolah Lapang.....	127
Gambar 3.20	Penerimaan penghargaan	131

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran melalui suatu pelaporan yang disebut Laporan Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DKPPP sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut DKPPP Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Penyusunan LKjIP DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No. 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan masih mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No.21 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
2. Perumusan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
3. Pengembangan teknologi pangan, pertanian dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;

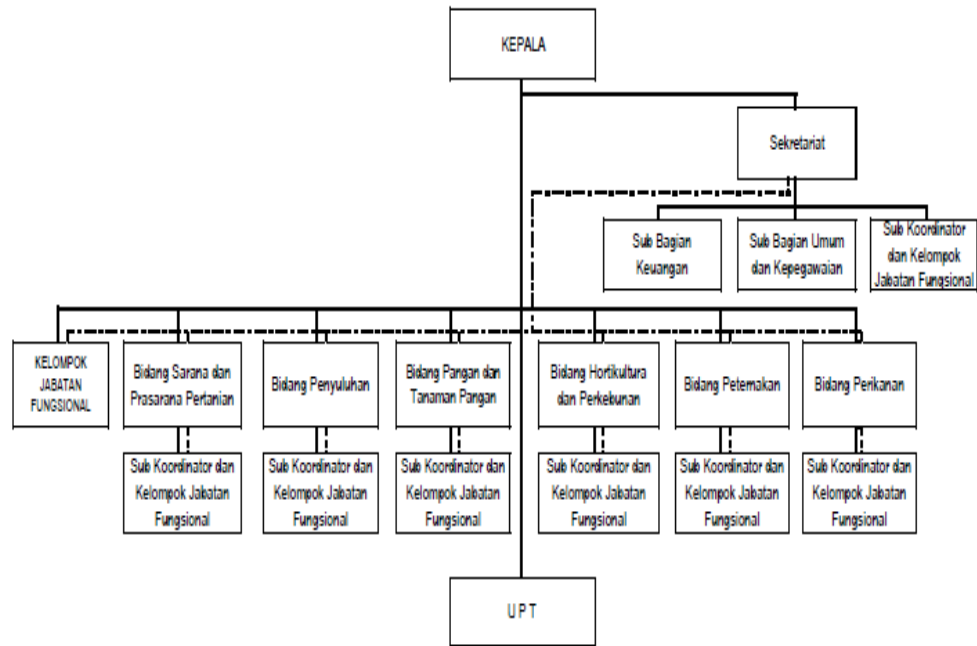
5. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;
6. Pengendalian lahan dan mitigasi bencana di lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
7. Pembinaan, pengawasan, penilaian kelayakan dan rekomendasi serta penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
9. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
10. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
11. Pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
12. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
13. Pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
14. Pelaksanaan pembinaan kepada upt di lingkup dinas;
15. Penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
16. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas kelompok Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Fungsional Perencana.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas Kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kepala bidang kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, terdiri atas Kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional.
- f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas Kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional..
- g. Bidang Peternakan, terdiri atas Kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional.
- i. UPT; dan

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung

3.1 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Tahun 2025 didukung ASN sebanyak 113 orang terdiri dari 77 orang PNS, PPPK 11 orang, PPPK Paruh Waktu 25 orang, dengan perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2025

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:			
a	SD	-	Orang
b	SMP	-	Orang
c	SMA	25	Orang
d	Sarjana Muda (D-III)	15	Orang
e	S-1 dan D-IV	62	Orang
f	S-2	11	Orang
		113	Orang

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:			
a	Gol I	-	Orang
b	Gol II	11	Orang
c	Gol III	55	Orang
d	Gol IV	11	Orang
e	PPPK	11	Orang
f	PPPK Paruh Waktu	25	Orang
Total		113	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan:			
a	Eselon II	1	Orang
b	Eselon III	7	Orang
c	Eselon IV	8	Orang
d	Eselon V	-	Orang
e	Jabatan Fungsional	48	Orang
f	Jabatan Fungsional Umum	49	Orang
Total ASN		113	
Pegawai Non ASN		22	

Sumber : DKPPP Tahun 2025

3.1.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, didukung Sarana dan prasarana berupa 107 (seratus tujuh) buah bangunan dan gedung, 32 (tigapuluh dua) bidang tanah, 2.684 (dua ribu enam ratus delapanpuluh empat) alat-alat angkutan, peralatan dan mesin.

Berikut merupakan tabel rangkuman sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kinerja pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2025

No	Jenis sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
a.	Tanah	32	Bidang	Baik
b.	Gedung dan bangunan	107	Buah	Baik/rusak
c.	Alat-alat angkutan (mobil, motor, kapal), alat dan mesin	2.684	Buah	Baik/rusak

Sumber : DKPPP Tahun 2025

4. Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu:

1. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah yang ditandai dengan rendahnya keberagaman pola konsumsi masyarakat serta belum terjaminnya keamanan pangan.
2. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petani dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.
4. Meningkatnya dampak perubahan iklim yang mempengaruhi stabilitas dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
- h. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung..

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang telah dan seharusnya dicapai
- sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C.SISTEMATIKA LKJIP

Penulisan LKJiP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa latar belakang, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN,
MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil;
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan

pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

Misi Kedua, Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

Misi Ketiga, Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Misi Keempat, Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi,

meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Misi Kelima, Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang akan didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama Daerah, yaitu :

1. Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing
2. Laju pertumbuhan ekonomi
3. Indek Pembangunan Manusia
4. Indeks Ketahanan Daerah
5. Indek reformasi birokrasi

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung menurut misi 2 (Kedua) dalam RPJMD.

Tabel 2. 1
 Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) RPJMD Tahun 2025 – 2029
 Untuk Tahun Ke - 1 (2025)

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR
Misi 2 (Kedua): Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil	
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Laju pertumbuhan ekonomi

Dari penjabaran di atas peran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah mendukung dan menyukseskan pencapaian Tujuan melalui program dan kegiatan pada urusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan. Adapun rincian dari tujuan, sasaran serta indikator untuk pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Tahun 2025-2029

No	VISI MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Kondisi akhir	TARGET						SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Visi : TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)	Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB perkapita	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka		78,91	79,63	79,9	80,35	80,72	81,08	Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	11,72	9,7	9,29	8,88	8,47	8,2	8,06
															Meningkatnya produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,27	22,25	22,3	22,41	22,52	22,64	22,75	
															Meningkatnya Produksi Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,47	22,4	22,35	22,3	22,25	22,2	22,15	
															Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	1. IKM Perangkat Daerah		84,36	85,35	85,7	86	86,35	86,65	86,75	
															2. Nilai AKIP Perangkat Daerah		74,36	74,8	74,85	74,9	75	75,1	75,15		

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan dan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima Amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas ketahanan Pangan pertanian dan perikanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79.27

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9.70

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	Meningkatnya produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	22.25
3	Meningkatnya Produksi Pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22.40

Dalam pencapaian kinerja sesuai dalam perjanjian kinerja didukung dengan anggaran seperti dalam tabel:

Tabel 2.4
Anggaran Belanja Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.330.224.240	APBD II
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 300.000.000	APBD II
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 163.297.000	APBD II
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 35.000.000	APBD II
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 247.023.670	APBD II
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 7.641.500	APBD II
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 18.273.173.157	APBD II
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 4.983.647.400	APBD II
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 458.449.800	APBD II
10	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.447.520.000	APBD II
		Rp 53.245.976.767	

Adapun perjanjian kinerja untuk pejabat administrator sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Program	Sasaran program	Indikator kinerja	Satuan	Target kinerja 2025
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase ketersediaan pangan pokok	%	100

Program	Sasaran program	Indikator kinerja	Satuan	Target kinerja 2025
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Angka	89,73
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan segar	%	100
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	140.15
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	10,670.94
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	%	10
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan ikan	Ton	395.752
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Produktivitas padi	ton/ha	6,15
		Produktivitas jagung	ton/ha	5,5
		Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,05
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	6,8
		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7
		Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7
		Produktivitas tembakau	ton/ha	0,64
		Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,702
		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,4
		Jumlah produksi daging ternak besar	kg	806.130,000
		Jumlah produksi daging ternak kecil	kg	267.584,000
		Jumlah produksi ternak unggas	kg	6.230.875
		Jumlah produksi telur	kg	6.860.985

Program	Sasaran program	Indikator kinerja	Satuan	Target kinerja 2025
		Persentase kelahiran pedet	%	48
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	36,1
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	%	100
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan,	%	85
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	75
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	75
Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas sdm dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58
		Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	1,3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan, umum dan perencanaan perangkat daerah (%)	%	100

C. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 14 program yang didukung oleh APBD sebesar Rp 54.941.992.117 dan Tugas Pembantuan (APBN) sebesar 780.313.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu *Rupiah*) terealisasi sebesar Rp 776.850.150,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 99.55%.,-, dengan rincian sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Uraian	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Kabupaten/Kota	25.302.824.240
2	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	0
3	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	300.000.000
4	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.297.000
5	Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000
6	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0
7	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	247.023.670
8	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	7.641.500
9	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	0
10	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	18.273.173.157
11	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.983.647.400
12	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	458.449.800
13	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0
14	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Program Penyuluhan Pertanian	3.447.520.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi	Interpretasi
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

a.1.1 Indikator kinerja tujuan

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tujuan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Tujuan DKPPP 2025-2029

Tujuan: Terpenuhinya Kebutuhan Pangan									
No	Indikator tujuan	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	-	79.27	68.5	86.41	80.72	68.5	84,86
Capaian Kinerja Tujuan						86.41			84,86

Sumber : DKPPP 2025

Indikator kinerja tujuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator baru sehingga tidak bisa membandingkan capaian dengan tahun sebelumnya karena tidak ada target yang ditentukan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional bahwa angka Indeks Ketahanan Pangan Kab. Temanggung Tahun 2024 sebesar 78.91. Tahun 2025 dengan target sebesar 79,27 terealisasi sebesar 68,5 atau rata-rata capaian kinerja sebesar 86,41 (kategori **“Tinggi”** atau terjadi penurunan angka IKP sebesar 10,41 yang disebabkan menurunnya indikator Prioritas NCPR (*Non-Cereal Primary Ratio* atau rasio konsumsi pangan non-serealialia terhadap total konsumsi pangan), prioritas protein hewani dan prioritas cadangan pangan. Dibandingkan dengan target akhir renstra capaian kinerja sebesar 84,86%, sehingga perlunya upaya yang lebih guna pencapaian target terutama pada indikator penyusun IKP yang masih merah.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tujuan dengan
Regional, Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Indikator	Realisasi					
	Temanggung	Wonosobo	Kota Magelang	Magelang	Provinsi	Nasional
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	68.5	69,43	73,41	71,84	73,73	73,00

Sumber : Bapanas 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran atau indikator komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (misalnya kabupaten, provinsi, atau negara). Indeks ini menunjukkan seberapa baik masyarakat di suatu daerah dapat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup sehat dan aktif.

IKP menilai tiga aspek utama:

1. Ketersediaan pangan

Menunjukkan apakah pangan tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah (produksi, cadangan, pasokan).

2. Akses terhadap pangan

Mengukur kemampuan masyarakat untuk mendapatkan atau membeli pangan, dipengaruhi oleh pendapatan, kemiskinan, harga pangan, dan infrastruktur.

3. Pemanfaatan pangan (konsumsi dan gizi)

Melihat apakah pangan yang dikonsumsi cukup bergizi dan dimanfaatkan dengan baik, termasuk faktor kesehatan, sanitasi, dan pola makan.

Tujuan penggunaan IKP, untuk:

- Mengidentifikasi daerah yang rawan pangan
- Menjadi dasar perencanaan kebijakan pangan
- Membantu pemerintah menentukan prioritas program ketahanan pangan

a.1.2 Sasaran strategis 1, Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian

Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2025 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian									
No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2024 (%)	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capain kinerja s/d 2025 (%)
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	98,12	22,4	22,47	100	22,2	100	100
<i>Rata -rata Capaian Kinerja Sasaran</i>			98,12			100			100

Sumber : DKPPP 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa IKU Rasio PDRB Sektor Pertanian Tahun 2025 dengan target sebesar 22,4 % terealisasi sebesar 22,47% (masih menggunakan data 2024, data Tahun 2025 dari BPS belum rilis) atau rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100% atau kategori "**Sangat Tinggi**". Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya trend realisasinya menurun (hal ini bukan berarti produksi pertanian menurun), tetapi karena sub sektor yang lain mengalami kenaikan (tumbuh lebih cepat). Dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Rasio PDRB Sektor
Pertanian Regional,
Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Indikator	Realisasi					
	Temanggung	Wonosobo	Kota Magelang	Magelang	Provinsi	Nasional
Rasio PDRB Sektor Pertanian	22,47	29	12,4	19,19	12, 88	13

Sumber : BPS Tahun 2025

Tabel 3.6
Realisasi Realisasi Kinerja Indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian
5 tahun terakhir

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio PDRB Sektor Pertanian	23,91	23,42	22,94	22,47	22,47

Sumber : BPS Tahun 2025

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makro ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian menurut lapangan usaha selama satu periode tertentu (tahunan/triwulan).

Dari tabel 3.5 dapat dijelaskan bahwa Rasio sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 mencapai **22,47%**, dibandingkan dengan realisasi kabupaten kota sekitar, provinsi serta nasional termasuk lebih tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam struktur perekonomian daerah. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian masih memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Hal ini dipengaruhi kondisi geografis Temanggung yang berada di wilayah dataran tinggi dengan kesuburan tanah yang baik sehingga mendukung pengembangan berbagai komoditas pertanian. Selain itu, keberadaan komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, serta berbagai komoditas hortikultura dataran tinggi

memberikan nilai ekonomi yang signifikan dalam struktur perekonomian daerah.

Di sisi lain, sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat pedesaan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada sektor ini. Dukungan program pembangunan pertanian dari pemerintah daerah maupun pusat, seperti peningkatan produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian, serta penguatan kawasan komoditas unggulan, turut mendorong keberlanjutan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Namun demikian, meskipun kontribusinya masih cukup besar, secara struktur ekonomi terjadi kecenderungan penurunan persentase kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun. Hal ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan industri pengolahan yang berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian ke depan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah produk melalui hilirisasi, serta penguatan agribisnis agar sektor pertanian tetap mampu menjadi penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah menurunnya luas panen (berkurangnya luas lahan produktif) yang berpengaruh pada berkurangnya kapasitas produksi pertanian dalam jangka panjang, ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi iklim dan cuaca (perubahan pola musim, curah hujan yang tidak menentu, serta potensi terjadinya bencana alam dapat mempengaruhi produktivitas dan stabilitas produksi komoditas pertanian, rendahnya nilai tambah produk pertanian (sebagian besar hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diperoleh relatif terbatas. Minimnya pengolahan hasil pertanian dan penguatan rantai pasok menyebabkan potensi ekonomi dari komoditas unggulan daerah belum sepenuhnya optimal), struktur

tenaga kerja pertanian yang didominasi oleh petani berusia lanjut serta masih terbatasnya adopsi teknologi pertanian modern juga menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Kondisi ini dapat mempengaruhi efisiensi usaha tani dan kemampuan sektor pertanian untuk berkembang secara berkelanjutan.

Upaya pencapaian target mempertahankan produksi melalui penerapan GAP, GHP dan penguatan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan hilirisasi produk, serta perlindungan lahan pertanian agar sektor pertanian tetap mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian daerah.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 27.162.790.357 dengan realisasi Rp 26.326.453.142 (96,69%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 836.337.215 atau 3,31%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 3,31% (capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 94,69%).

Hasil pencapaian target kinerja sasaran 1 yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya peningkatan produksi pada beberapa komoditas pertanian seperti cabai, kopi, komoditas peternakan masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dari hasil panen komoditas hortikultura (cabai) dan perkebunan (kopi).



Gambar 3.1
Kegiatan Pengubinan Jagung Program Bantuan Benih Jagung
Varietas Pertiwi 3 dan P-35

a.1.2 Sasaran strategi 2, Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan

IKU sasaran strategis tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan yaitu Prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment /PoU*). *Prevalence of Undernourishment (PoU)* merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk yang mengalami kekurangan gizi kronis, yaitu kondisi ketika asupan energi pangan rata-rata masyarakat berada di bawah kebutuhan energi minimum untuk hidup sehat dan aktif. Nilai PoU digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan dan gizi masyarakat serta menjadi salah satu indikator dalam pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya target “Tanpa Kelaparan” (Zero Hunger).

Indikator PoU digunakan secara resmi oleh FAO (Food and Agriculture Organization) dalam memantau ketahanan pangan global dan menjadi salah satu ukuran utama untuk menilai kemajuan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 2: Tanpa Kelaparan). PoU memperhitungkan:

1. Ketersediaan energi pangan rata-rata per kapita
2. Distribusi konsumsi energi di antara penduduk (ketimpangan konsumsi)
3. Kebutuhan energi minimum (Minimum Dietary Energy Requirement/MDER)

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis 2 : Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan									
No	IKU	Satuan	Capaian (%) 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja s/d 2029(%)
1	Prevalensi ketidacukupan pangan (PoU)	angka	-	9,7	11,23	84,22	8,06	84,22	71,77
	Capaian Indikator Kinerja Utama					84,22			71,77

Sumber : DKPPP 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Prevalensi Ketidacukupan pangan (PoU) Tahun 2025 dengan target sebesar 9,7 terealisasi sebesar 11,23 atau rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 84,22% atau kategori **“Tinggi”**. IKU Prevalensi Ketidacukupan pangan (PoU) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 11,72% mengalami penurunan, kondisi ini mencerminkan keberlanjutan stabilisasi harga 9 bahan pangan serta kenaikan efektivitas program bantuan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Peningkatan akses terhadap pangan tersebut berkontribusi pada membaiknya konsumsi kalori masyarakat, sehingga mendorong penurunan angka *undernourishment*. Dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai sebesar 71,77%.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Prevalensi Ketidakcukupan pangan (PoU) Regional, Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Indikator	Realisasi					
	Temanggung	Wonosobo	Kota Magelang	Magelang	Provinsi	Nasional
Prevalensi Ketidakcukupan pangan (PoU)	11,23	11,57	9,21	12,36	8,61	7,89

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) Tahun 2025 Kabupaten Temanggung secara regional lebih rendah dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang tetapi masih diatas realisasi provinsi dan nasional.

Tabel 3.9
Realisasi Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi Ketidakcukupan pangan (PoU)	16,16	18,48	14,39	10,26	11,72	11,23

Sumber : DKPPP Tahun 2025

Pada tahun 2020 realisasi 16,16%, dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 18,48%, yang diduga merupakan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat. Memasuki tahun 2022, nilai PoU menurun (mengalami perbaikan) signifikan menjadi 14,39%, seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya ketersediaan pangan hasil panen lokal. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 10,26%, sebagai hasil dari berbagai intervensi pangan dan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah daerah. Pada tahun 2024, PoU sedikit meningkat menjadi 11,72%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pokok dan faktor iklim terhadap produksi pertanian. Angka PoU 2025 menurun pada angka 11,23%.

Dalam upaya penurunan angka PoU Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) melaksanakan berbagai program dan intervensi yang berfokus pada peningkatan akses serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. Beberapa upaya strategis yang telah dilaksanakan antara lain:

a. **Gerakan Pangan Murah (GPM)**

Kegiatan GPM dilaksanakan secara rutin di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok tahun 2025 dilakukan sebanyak 48 kali GPM. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan dan periode kenaikan harga pangan. Upaya ini terbukti efektif dalam memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan menekan potensi kerawanan pangan.

b. **Subsidi Pangan di Beberapa Desa Prioritas**

Sebagai bentuk intervensi langsung terhadap kelompok rentan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi melaksanakan program subsidi pangan berupa beras dan minyak goreng di beberapa desa di Kecamatan Temanggung, Ngadirejo, dan Bansari. Program ini didanai **dari** APBD Provinsi Jawa Tengah dan ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok serta menjaga ketahanan pangan rumah tangga.

c. **Penyaluran Bantuan Pangan Juni–Juli, Oktober - November 2025**

Selama periode Juni hingga Juli 2025, telah disalurkan bantuan pangan kepada 72.028 penerima manfaat di 20 Kecamatan, masing-masing menerima 10 kilogram beras per bulan (total beras tersalurkan bulan Juni 720.280 kg dan bulan Juli 720.280 kg). Bantuan pangan periode Oktober – November sebanyak 69.864 penerima manfaat, masing-masing mendapat beras

sebanyak 10 kg dan minyak goreng 2 liter per bulan (total bantuan beras bulan Oktober sebanyak 698.640 kg dan minyak 139.728 liter, bulan November sebanyak 698.640 kg dan minyak 139.728 liter) Bantuan ini bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, sehingga secara langsung dapat menekan angka kekurangan konsumsi energi masyarakat.

d. **Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)**

Sebagai upaya tambahan dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat rentan, DKPPP juga menyalurkan **Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)** sebanyak 4.235 kg di beberapa Lokasi yang terdampak bencana. Program ini menjadi bentuk tanggap cepat dalam mengantisipasi kondisi darurat pangan di tingkat desa.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan program yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 498.297.000 dengan realisasi Rp 436.387.240 (87,57%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 61.909.760 atau 12,43%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 12,43% (capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 87,57%). Pencapaian kinerja indikator sasaran strategis 2 banyak di dukung dari anggran APBN dan APBD Provinsi.

Hasil pencapaian target kinerja sasaran 2 yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga,

perbaikan status gizi masyarakat, produktivitas masyarakat meningkat, memingkatkan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 3.2

Gerakan pangan untuk stabilisasi harga dan bantuan pangan kepada masyarakat

a.1.3 Sasaran strategi 3, Meningkatnya Produksi Perikanan

IKU sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan yaitu Angka Kosumsi Ikan. Angka Konsumsi Ikan atau disingkat dengan AKI merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang/masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar dengan satuan kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan yang didapatkan dari konsumsi ikan dalam rumah tangga + konsumsi ikan luar rumah tangga + konsumsi ikan tidak tercatat. AKI merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara teknis dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Manfaat dari perhitungan AKI adalah untuk:

- Menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah
- Mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah
- Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan									
No	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Realisasi 2025 (%)	Capain kinerja s/d 2025 (%)
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap/thn	100	22,25	22,27	100	22,3	22,27	99,86
<i>Capaian Indikator Kinerja Utama</i>			100			100			100

Sumber : DKPPP Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025 dengan target sebesar 11,25 kg/kap/thn terealisasi sebesar 11,27 kg/kap/thn atau rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100% atau kategori **“Sangat Tinggi”**. indikator Angka Konsumsi Ikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 11,25% mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai sebesar 99,86%. Dibandingkan dengan capaian regional propinsi dan nasional diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi Angka Konsumsi Ikan Regional, Provinsi dan Nasional tahun 2025

Indikator	Temanggung	Wonosobo	Kota Magelang	Kabupaten Magelang	Provinsi	Nasional
Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,27	19	30	18,6	40,14	26,08

Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat konsumsi protein hewani masyarakat yang berperan dalam peningkatan kualitas gizi dan kesehatan. Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional, konsumsi ikan di beberapa wilayah dataran tinggi di wilayah Kedu masih relatif lebih rendah. Pada tahun 2025, tingkat konsumsi ikan secara nasional mencapai sekitar 26,08 kg/kapita/tahun, sedangkan di tingkat Provinsi

Jawa Tengah telah mencapai sekitar 40,14 kg/kapita/tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Jawa Tengah memiliki tingkat konsumsi ikan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya wilayah pesisir di Jawa Tengah yang memiliki akses lebih mudah terhadap sumber daya perikanan. Sementara itu, pada wilayah kabupaten/kota di kawasan Kedu seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang, tingkat konsumsi ikan masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Perbedaan tingkat konsumsi ikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain letak geografis wilayah yang jauh dari daerah pesisir, keterbatasan ketersediaan dan distribusi ikan segar, kebiasaan pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi sumber protein lain seperti ayam dan telur, serta faktor daya beli masyarakat. Di sisi lain, wilayah perkotaan seperti Kota Magelang cenderung memiliki akses pasar yang lebih luas sehingga konsumsi ikan relatif lebih tinggi.

Dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai program seperti Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), penguatan distribusi produk perikanan, serta edukasi gizi kepada masyarakat menjadi penting untuk terus dilakukan. Peningkatan konsumsi ikan diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas gizi masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber protein hewani yang sehat dan terjangkau.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung antara lain dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Kegiatan Sosialisasi Gemarikan merupakan program kegiatan Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar menjadikan ikan sebagai bagian utama dari pola makan sehari-hari dan membantu program pemerintah untuk mencegah stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang menyebabkan anak memiliki postur tubuh pendek atau jauh dari rata-rata anak lain

di usianya. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Kasus stunting di Kabupaten Temanggung masih menjadi isu serius dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah berupaya menekan angka kasus stunting dengan pencegahan sedini mungkin, salah satunya dengan kegiatan Sosialisasi Gemarikan.

Kegiatan Sosialisasi Gemarikan di Kabupaten Temanggung bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan Sosialisasi Gemarikan dilaksanakan pada lokasi prioritas penanggulangan stunting atau wilayah di kabupaten Temanggung yang masih memiliki angka prevalensi stunting relatif tinggi. Pada kegiatan sosialisasi dilakukan penyampaian materi oleh narasumber terkait pentingnya konsumsi ikan untuk mendukung penurunan stunting dan penyerahan paket gemarikan yang berisi produk olahan ikan. Target penerima paket Gemarikan adalah anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang merupakan kelompok rentan dan membutuhkan asupan protein yang tinggi. Kegiatan Gemarikan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Daftar bantuan paket Gemarikan

No.	Tanggal	Lokasi	Jumlah	Sasaran	Sumber Dana
1	9 Juli 2025	Balai Desa Kalirejo, Kec. Kledung	100 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBD Provinsi Jawa Tengah
2	15 Oktober 2025	Balai Desa Nglondong, Kec. Parakan	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP
3	27 November 2025	Balai Desa Danurejo, Kec. Kedu	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta - KKP
4	15 Desember 2025	Balai Desa Baledu, Kec. Kandangan	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN - Direktorat Jenderal Penguatan Daya

					Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP
5	15 Desember 2025	Balai Desa Gondang Wayang, Kec. Kedu	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP

Tabel 3.13
Realisasi Angka Konsumsi Ikan Kab Temanggung tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Konsumsi Ikan (AKI)	21,22	21,78	21,88	22,27	22,27

Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek ketersediaan, aksesibilitas, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein hewani dari ikan. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gizi dan Kesehatan, rogram pemerintah dalam kampanye konsumsi ikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan sosialisasi pola konsumsi pangan bergizi seimbang turut berperan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara rutin, Meningkatnya ketersediaan dan distribusi produk perikanan, Perkembangan industri pengolahan hasil perikanan (Inovasi produk olahan seperti nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, hingga berbagai makanan siap saji berbahan dasar ikan menjadikan ikan lebih mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak.), dukungan sektor perikanan budidaya (engembangan budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan gurami di daerah daratan mampu meningkatkan pasokan ikan lokal sehingga memperluas akses masyarakat terhadap produk perikanan.), Peningkatan daya beli Masyarakat.

Hal-hal yang menghambat ketercapaian AKI antara lain keterbatasan akses dan distribusi ikan, pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh sumber protein lain, kurangnya pengetahuan

masyarakat mengenai manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan dan gizi, terbatasnya variasi produk olahan berbahan dasar ikan di tingkat local.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan berbagai langkah strategis guna mendorong peningkatan konsumsi ikan di masyarakat, antara lain:

1. Penguatan sosialisasi dan edukasi gizi kepada masyarakat melalui kampanye konsumsi ikan secara berkelanjutan, termasuk melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN),
2. Peningkatan ketersediaan dan akses terhadap produk perikanan, antara lain melalui penguatan distribusi ikan,
3. Pengembangan pasar ikan, serta dukungan terhadap kegiatan usaha perikanan budidaya di daerah,
4. Pengembangan dan diversifikasi produk olahan berbahan dasar ikan, sehingga lebih menarik, praktis, dan mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat,
5. Pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas akses pasar, sinergi program lintas sektor, seperti dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, dalam rangka mendorong pola konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan program yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 254.665.170 dengan realisasi Rp 254.166.516 (98,80%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 498.654 atau 1,2%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 1,2%. (capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 98,80%).

Indikator kinerja ini lebih banyak didukung oleh sumber anggaran dari APBN dan APBD Provinsi berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan untuk kelompok yang diberikan dalam bentuk barang dan paket Gemarikan.



Gambar 3.3

KIE dan Sosialisasi Gemarikan

B.1 Capaian Kinerja Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh DKPPP sebanyak 13 Program dengan 29 indikator sasaran program.

b.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Pangan Pokok.

Persentase Ketersediaan Pangan Pokok dipengaruhi oleh produksi bersih beras, jumlah cadangan pangan pemerintah serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 3.14
 Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Pokok
 Tahun 2025

No	Indikator	SATUAN	CAPAIAN (%) 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target thn 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja s/d 2025 (%)
1	Persentase kesediaan pangan	%	na	100	98.63	98.63	100	98.63	98.63
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program					98.63	98.63			98.63

Sumber : DKPPP 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Persentase Ketersediaan Pangan Pokok Tahun 2025 sebesar 98.63% kategori **“Sangat Tinggi”**. Indikator ini tidak dapat dibandingkan target tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Dengan target Renstra sebesar 100% tercapai 98,63%.

Dalam mencapai target indikator tersebut beberapa langkah strategis yang sudah di lakukan antara lain :

1. Koordinasi lintas OPD terkait dengan peningkatan produksi dengan perbaikan infrastruktur irigasi serta penambahan areal tanam (PAT) guna peningkatan (minimal mempertahankan) produksi tanaman pangan,
2. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan pangan sesuai standart,
3. Peningkatan indeks pertanaman padi serta penggunaan benih padi unggul berlabel,
4. Peningkatan kerjasama dengan daerah surplus komoditas beras dalam bentuk perdagangan/meningkatnya akses distribusi serta keterjangkauan pangan,
5. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen,
6. Pengolahan dan distribusi pangan

7. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat.

Faktor penghambat pencapaian target diantaranya

- a. Faktor produksi : karena perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, terbatasnya lahan produktif, penerapan GAP dan GHP belum sesuai standart
- b. Faktor distribusi : gangguan rantai pasok, ketimpangan distribusi antar wiayah (daerah surplus dan defisit)
- c. Faktor ekonomi : harga pangan tidak stabil (inflasi pangan), daya beli masyarakat rendah
- d. Faktor sosial dan konsumsi pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat.

Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase Ketersediaan Pangan Pokok:

- a. **Peningkatan Produksi Pertanian : penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian modern, penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara efektif**
- b. Peningkatan Produksi Pertanian: penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian modern, penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara efektif
- c. Stabilitas Harga dan Akses Ekonomi : Kebijakan stabilisasi harga pangan, Peningkatan daya beli masyarakat, Program bantuan pangan atau subsidi untuk kelompok rentan
- d. Kebijakan dan Tata Kelola yang Efektif : Penguatan cadangan pangan pemerintah
- e. Diversifikasi Pangan : Pengembangan konsumsi pangan lokal non-beras, Edukasi masyarakat tentang pola makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)

Untuk mencapai sasaran kinerja program didukung dengan anggaran sebesar Rp 0 dengan realisasi keuangan Rp 0 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 100%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,63% dibandingkan

dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 98,63%. Program ini lebih banyak di support oleh program-program yang lain dan anggaran dari APBN dan APBD I.



Gambar 3.4
Pengubinan Padi

b.1.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat yaitu Skor Pola Pangan Harapan.

Pola Pangan Harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola Pangan Harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Skor Pola Pangan harapan Tahun 2025

No	Indikator	SATUAN	CAPAIAN (%) 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target thn 2029	Realisasi 2025 (%)	Capaian kinerja s/d 2025 (%)
1	Skor Pola Pangan harapan	angka	100	89.73	89,87	100	91.23	89,87	98,50
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program			100			100			98,50

Sumber : DKPPP 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Skor Pola Pangan harapan Tahun 2025 sebesar 100% kategori “**Sangat Tinggi**”. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tercapai 100%, dibandingkan target akhir renstra sebesar 98,50%.

Tabel 3.16

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Skor Pola Pangan Harapan	79.7	80,10	93,5	89,43	89,87

Sumber : DKPPP 2025

Berdasarkan tabel di atas, skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019-2023 cenderung meningkat sampai tahun 2023 dan menurun di Tahun 2024 dengan capaian sebesar 89,43 turun sebesar 4,07 point, dan tahun 2025 naik menjadi 89.87.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk atau ketersediaan pangan, baik jumlah maupun komposisi/keragaman pangan menurut jenis pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahunun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam

evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989).

Kualitas konsumsi pangan penduduk Temanggung pada umumnya sudah mengarah pada komposisi konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Apabila ditinjau dari sembilan kelompok pangan pada Pola Pangan Harapan. Berdasar 9 bahan kelompok pangan sebagai faktor perhitungan skor PPH diperoleh bahwa, kenaikan skor PPH tahun 2025 disebabkan oleh penurunan konsumsi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain dan peningkatan konsumsi minyak dan lemak.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja rasio skor Pola Pangan Harapan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yaitu :

a. Promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA

Promosi konsumsi pangan B2SA merupakan suatu program yang dirancang sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), dengan harapan terbentuk pola konsumsi masyarakat yang sehat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif. Kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan diantaranya adalah : B2SA Goes to School (BGTS), Gerakan/Kampanye/Sosialisasi, Pemasangan Iklan B2SA, Promosi melalui media sosial, lomba menu B2SA dan kegiatan pelatihan pembuatan menu B2SA untuk keluarga dengan melibatkan TP PKK Kecamatan dan sekolah. Berbagai kegiatan dalam promosi konsumsi pangan B2SA telah banyak dilaksanakan. Namun demikian, upaya meningkatkan konsumsi sayur dan buah masih perlu mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait,

karena preferensi dan tingkat konsumsi buah dan sayur terkait erat dengan faktor-faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup dan pola makan (food habit), tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral.

b. Pengembangan Desa B2SA

DKPPP mendukung upaya penanganan masalah gizi di Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di 3 kelompok yaitu KWT Putri Tani Desa Campuranom Kec Bansari, KWT Sekar Makmur Tegalsari Ngadirejo, KWT Arimbi Munggangsari Ngadirejo yang bertujuan mendorong Masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA sehari – hari guna mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat, dan produktif. Kegiatan Pengembangan Desa B2SA merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam 1 (satu) wilayah desa/wilayah yang setara, dengan komponen kegiatan yaitu kebun B2SA, bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan dengan melibatkan TP – PKK sebagai wujud kolaborasi dan sinergi kegiatan. Manfaat yang dirasakan setelah kegiatan ini dilaksanakan adalah masyarakat semakin memahami konsumsi pangan B2SA sehingga dapat menerapkan konsumsi sehari-hari di rumah tangga.

c. Meningkatkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, berupa bantuan kegiatan pekarangan pangan bergizi (P2B) dari APBN untuk 15 kelompok wanita tani. Meningkatkan ketersediaan pangan ke tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

d. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan.

e. Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan).

- f. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tetap stabil ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung, melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan
Regional, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025

Indikator	Tabel					
	Temanggung	Wonosobo	Kabupaten Magelang	Kota Magelang	Propinsi	Nasional
Skor Pola Pangan Harapan	89.87	92,4	93,6	93,1	96,9	95,1

Perbandingan realisasi Skor PPH seperti Temanggung, Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang masih di bawah rata-rata provinsi sehingga masih perlu peningkatan penganekaragaman pangan. Provinsi Jawa Tengah memiliki skor lebih tinggi dari nasional, Ini menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan masyarakat di tingkat kabupaten masih perlu ditingkatkan.

Untuk mencapai sasaran kinerja program didukung dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000 dengan realisasi keuangan Rp 245.676.500 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 54.323.500 (81,89%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 81,89% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 18,11%. Program ini lebih banyak di support oleh program-program yang lain dan anggaran dari APBN dan APBD Propinsi.



Gambar 3.5
Sosialisasi B2SA di Pondok Pesantren

b.1.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan diukur dengan indikator yaitu persentase penanganan kerawanan pangan.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi atas ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja persentase penanganan kerawanan pangan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Rensntra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian indikator Kinerja Program		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% atau kategori **“Sangat Tinggi”**, dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya konsisten 100%. Dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja persentase penanganan kerawanan pangan Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	na	na	na	100	100

Sesuai dengan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) di Kabupaten Temanggung, yang terindikasi daerah rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3 ada 17 desa. Upaya penanganan kerawanan pangan dilakukan melalui kegiatan stabilisasi pangan dan harga pangan meliputi 20 Kecamatan dengan Gerakan Pangan Murah yang bertujuan memudahkan akses masyarakat terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan serta kegiatan pemberian bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan jumlah penerima sebanyak 72.028 jiwa dibulan Juni dan bulan Juli 72.028 jiwa berupa bantuan beras 10kg serta penyaluran bulann Oktober sebanyak 69.864 jiwa dan bulan November 69.864 jiwa berupa beras 10 kg dan minyak 2 liter.

Selain itu, faktor ekonomi masyarakat juga turut mempengaruhi tingkat kerawanan pangan. Tingkat kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan sebagian rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi. Kenaikan harga bahan pangan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat juga memperburuk kemampuan akses pangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Dari aspek distribusi, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah turut berperan dalam meningkatkan risiko kerawanan pangan. Daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau memiliki jaringan distribusi yang kurang memadai cenderung mengalami keterlambatan pasokan pangan dan harga pangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Selain faktor tersebut, bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor juga dapat mengganggu sistem produksi maupun distribusi pangan.

Faktor Pendorong indikator ini adalah perluasan akses informasi kerawanan pangan, pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial ekonomi politik dan keamanan, pengentasan kemiskinan, program bansos dr pemerintah, peningkatan aksesibilitas pangan

Faktor penghambat indikator ini adalah

1. Penurunan produksi tanaman pangan karena dampak perubahan iklim dan serangan hama
2. peningkatan jumlah penduduk
3. Kemiskinan dan Daya Beli Masyarakat Rendah
4. Kenaikan Harga Pangan
5. Keterbatasan diversifikasi pangan

Upaya penanganan daerah rawan pangan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan pada aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Dari sisi ketersediaan pangan, dengan mendorong peningkatan produksi pangan melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan, pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, serta penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah juga menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi kekurangan pangan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan.

Dari aspek akses pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi rumah tangga menjadi salah satu strategi yang perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha pertanian dan pangan lokal, serta dukungan terhadap usaha mikro dan kecil yang berbasis pangan. Upaya stabilisasi harga pangan dan penguatan sistem distribusi pangan juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas konsumsi dan pemanfaatan pangan juga menjadi bagian penting dalam upaya penanganan kerawanan pangan. Program edukasi dan sosialisasi mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman perlu terus ditingkatkan guna mendorong pemanfaatan sumber pangan lokal secara optimal. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu.

Di sisi lain, penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta pemetaan wilayah rentan pangan perlu terus dilakukan secara berkala guna memastikan intervensi program dapat tepat sasaran. Sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci dalam memperkuat upaya penanganan kerawanan pangan secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 163.297.000 dengan realisasi Rp 156.676.890 (95,94%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 95,94% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,06%. Keberhasilan Program ini didukung juga oleh kegiatan dari program lainnya dan kegiatan dari APBN dan APBD I.



Gambar 3.6
Bantuan pangan ke masyarakat

b.1.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan diukur dengan indikator yaitu Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar

Keamanan pangan secara definisi adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Kualitas dari bahan baku pangan olahan yang berasal dari pangan segar, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti residu pestisida dan obat-obatan terkait perlakuan on-farm pada saat budidaya, serta sifat genetik/kemungkinan transgenik.

Penanganan pasca panen yang kurang tepat, penyimpanan yang kurang memperhatikan sifat bahan pangan juga akan menurunkan mutu dan kualitas pangan. Demikian pula alat dan cara pengolahan pangan yang tidak tepat juga berpotensi mengurangi kandungan gizi, seperti pemasakan yang terlalu lama, mengalami oksidasi, atau kurang higienenya peralatan yang digunakan juga dapat menimbulkan masalah apabila makanan tersebut dikonsumsi.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Capain Kinerja Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi
Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	98,37	100	93,10	93,10	100	93,10	93,10
Rata-rata capaian indikator kinerja program			98,37			93,10			93,10

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja program pada Tahun 2025 tercapai sebesar 93,10%, kategori **“sangat tinggi”** dibandingkan tahun sebelumnya capaian kinerja menurun, hal ini disebabkan jumlah sampel yang diuji lebih banyak dan lokasi pengambilan sample lebih beragam (dibandingkan tahun sebelumnya). Dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 93,10%. Tahun 2025 jumlah sampel yang di uji sebanyak 145 sampel dengan hasil sample 135 negatif (aman) dan 10 sampel melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Tabel 3.21

Rekapitulasi capaian kinerja Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	100	100	98,37	93,10

Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha pangan, petani, dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam proses produksi, penanganan, hingga distribusi pangan segar. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait turut mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik penanganan pangan yang baik.

Selain itu, adanya pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap produk pangan segar yang beredar di masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan. Ketersediaan regulasi serta pedoman teknis mengenai keamanan pangan segar turut menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Faktor lain yang mendukung adalah semakin berkembangnya sistem rantai pasok pangan yang lebih baik, termasuk peningkatan fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang mampu menjaga kesegaran dan kualitas pangan hingga sampai ke konsumen.

Faktor Penghambat

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, peningkatan mutu dan keamanan pangan segar masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu faktor penghambat utama adalah masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku usaha pangan, khususnya pada skala kecil, terhadap standar keamanan pangan dan cara penanganan pangan segar yang baik.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas penyimpanan, alat transportasi yang memadai, serta teknologi pascapanen juga dapat mempengaruhi kualitas pangan segar yang beredar di

masyarakat. Proses distribusi yang panjang dan kurang terjaganya rantai dingin (cold chain) juga dapat menyebabkan penurunan mutu produk pangan.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan pengujian mutu pangan secara menyeluruh juga menjadi tantangan, sehingga belum seluruh produk pangan segar dapat terpantau secara optimal.

Upaya atau Strategi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, diperlukan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan, petani, serta pedagang mengenai penerapan cara produksi pangan yang baik dan penanganan pangan segar yang higienis.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan pengujian keamanan pangan juga perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan monitoring, sampling, dan pengujian laboratorium terhadap pangan segar yang beredar di pasar. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan sarana prasarana pengawasan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengendalian mutu pangan.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen agar lebih selektif dalam memilih pangan segar yang aman dan berkualitas. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan kualitas dan keamanan pangan segar yang beredar dapat terus meningkat sehingga mampu melindungi kesehatan masyarakat.

Untuk mencapai kinerja program didukung dengan anggaran sebesar Rp 35.000.000 dengan realisasi Rp 34.033.850 (97,23%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,77%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 93,10% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 97,23% sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 4,13%.



Gambar 3.7
Uji Residu Pangan Segar Asal Tanaman di Pasar Parakan dan Kandangan

b.1.5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan yaitu jumlah produksi perikanan tangkap

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap menggambarkan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan serta kinerja sektor perikanan tangkap dalam mendukung penyediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Tingkat produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sumber daya ikan di perairan, jumlah dan kapasitas armada penangkapan, alat tangkap yang digunakan, serta kemampuan dan pengalaman nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Capaian kinerja indikator program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.22
Capaian kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2025

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Resntra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja tahun s/d 2025 (%)
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	na	140.15	140.18	100	141	100	99,41
	Rata-rata capaian kinerja program		na			100			99,41

Sumber : DKPPP Tahun 2025

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 140,18 ton atau capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau kategori “**Sangat tinggi**”. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena merupakan indikator baru (tetapi data jumlah produksi ikan tahun sebelumnya tersedia), jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 99,14%.

Faktor Pendorong pencapaian target jumlah produksi perikanan tangkap antara lain :

- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan aktif mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat.
- Banyak kampanye kesehatan menekankan pentingnya mengkonsumsi ikan demi mendapatkan asupan gizi yang seimbang.
- Ikan dianggap sebagai sumber protein yang baik dan memiliki manfaat kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke.
- Kegiatan restocking ikan di perairan terbuka untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Faktor penghambat pencapaian target nilai jumlah produksi perikanan tangkap antara lain :

- Kerusakan lingkungan dapat mengurangi populasi ikan dan habitatnya.
- Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola perkembangbiakan dan ketersediaan stok ikan.
- Kerjasama yang kurang: kerja sama yang kurang antara nelayan,

pemerintah, dan stakeholder lainnya dapat menghambat pengelolaan perikanan yang efektif.

- Penggunaan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan
- Berkembangbiaknya ikan predator di perairan umum.

Untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan, diperlukan berbagai upaya strategis yang dilakukan secara terpadu berupa melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan teknik penangkapan ikan yang efektif dan ramah lingkungan, dukungan bantuan sarana dan prasarana penangkapan seperti alat tangkap, maupun peralatan pendukung lainnya juga perlu terus ditingkatkan, penguatan kelembagaan nelayan serta pengembangan kelompok usaha perikanan juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, upaya pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan perlu terus dilakukan guna menjaga ketersediaan sumber daya ikan di perairan, peningkatan akses pasar, penguatan rantai distribusi hasil perikanan, serta pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan tangkap. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan produksi perikanan tangkap dapat terus meningkat sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Tabel. 3.23

Daftar pemberian bantuan benih ikan untuk restocking ikan Tahun 2025

Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah	Realisasi	Keterangan	Sumber Anggaran
				(Ekor)	Kegiatan (%)		
Pemerintah Desa Donorojo	Donorojo	Tretep	Benih Nilem / tawes	1.800	100	Benih Restocking Perairan Umum	APBD Provinsi
Pemerintah Desa Campurejo	Campurejo	Tretep	Benih Nilem / tawes	1.800	100	Benih Restocking Perairan Umum	APBD Provinsi
Pemerintah Desa Tretep	Tretep	Tretep	Benih Nilem / tawes	1.800	100	Benih Restocking Perairan Umum	APBD Provinsi
Pemerintah Desa Tawangsari	Tawangsari	Wonoboyo	Benih Nilem / tawes	1.800	100	Benih Restocking Perairan Umum	APBD Provinsi
Pemerintah Desa Tening	Tening	Wonoboyo	Benih Nilem / tawes	1.800	100	Benih Restocking Perairan Umum	APBD Provinsi
Pokmaswas Tretes	Jumo		Benih Nilem, Tawes	130.000	100	Benih Restocking Perairan Umum	APBN
Jumlah				139.000			
Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah	Realisasi	Keterangan	Sumber Anggaran
				(buah)	Kegiatan (%)		
Nelayan Desa Kedu	Kedu	Kedu	Kartu Asuransi Nelayan	50	100	Asuransi Nelayan	APBD Provinsi
Nelayan Desa Campursalam	Campursalam	Parakan	Kartu Asuransi Nelayan	50	100	Asuransi Nelayan	APBD Provinsi

Untuk mencapai kinerja program didukung dengan anggaran sebesar Rp 0 dengan realisasi Rp 0 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 100%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%.



Gambar 3.7
Pemberian bantuan untuk restocking ikan di perairan terbuka

b.1.6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator Jumlah produksi perikanan budidaya.

Indikator jumlah produksi perikanan budidaya menunjukkan total produksi komoditas perikanan yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, baik di kolam, tambak, keramba maupun media budidaya lainnya dalam satu tahun. Indikator ini menjadi salah satu parameter penting dalam menilai perkembangan subsektor perikanan budidaya, sekaligus menggambarkan tingkat produktivitas usaha pembudidayaan ikan di daerah.

Kabupaten Temanggung, produksi perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan sumber pangan bergizi, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha perikanan. Peningkatan

jumlah produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa kegiatan budidaya berkembang dengan baik, baik dari sisi luas usaha, jumlah pembudidaya, maupun produktivitas per satuan lahan. Selain itu, peningkatan produksi juga mencerminkan adanya dukungan program pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan budidaya melalui pembinaan teknis, bantuan sarana prasarana, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan..

Capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	na	10.670,94	10.671,40	100	10.678,41	100	99,93
Rata -rata capaian kinerja program						100			99,93

Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% atau kinerja “**sangat tinggi**”, indicator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 karena merupakan indicator baru, Dibandingkan dengan target akhir Renstra tercapai 99,93%.

Tabel 3.25
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2021-2025

NO	Indidkator	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	13.873,97	12.532,54	13.419,74	10.670,41	10.671,40

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tercapainya target produksi menunjukkan bahwa potensi sumber daya perikanan budidaya di daerah telah dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, keberhasilan ini mencerminkan efektivitas

kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pembudidaya ikan dalam meningkatkan produktivitas usaha budidaya.

Dengan meningkatnya produksi perikanan budidaya, diharapkan dapat mendukung ketersediaan pasokan ikan di masyarakat serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya peran subsektor perikanan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah

Peningkatan produksi perikanan budidaya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, antara lain:

1. Potensi sumber daya alam yang mendukung, terutama ketersediaan sumber air yang relatif melimpah serta kondisi lingkungan yang sesuai untuk kegiatan budidaya ikan air tawar.
2. Adanya kelompok pembudidaya ikan yang aktif, sehingga mempermudah proses pembinaan, penyuluhan, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih baik.
3. Dukungan program pemerintah daerah dan pusat, seperti bantuan benih ikan, pakan, sarana budidaya, serta pendampingan teknis kepada pembudidaya.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan, yang berdampak pada meningkatnya permintaan pasar terhadap produk perikanan budidaya.
5. Pengembangan teknologi budidaya yang lebih efisien, seperti penggunaan kolam terpal, sistem bioflok, serta manajemen pakan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan budidaya, antara lain:

1. Tingginya harga pakan ikan, yang menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha budidaya sehingga mempengaruhi tingkat keuntungan pembudidaya.
2. Keterbatasan ketersediaan benih ikan berkualitas secara berkelanjutan, yang dapat berdampak pada produktivitas dan tingkat kelangsungan hidup ikan.

3. Serangan penyakit ikan serta penurunan kualitas air, yang dapat menyebabkan penurunan produksi bahkan kegagalan panen.
4. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, yang mempengaruhi stabilitas lingkungan budidaya.
5. Keterbatasan permodalan pembudidaya skala kecil, sehingga belum mampu mengembangkan usaha budidaya secara lebih intensif.
6. Fluktuasi harga hasil perikanan di tingkat pembudidaya, yang dapat menurunkan minat masyarakat untuk meningkatkan produksi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan, melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan terkait teknik budidaya yang baik dan efisien.
2. Penguatan penyediaan benih unggul, melalui pengembangan unit pembenihan serta distribusi benih berkualitas kepada kelompok pembudidaya.
3. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana budidaya, seperti kolam, pakan, dan peralatan budidaya guna meningkatkan produktivitas usaha.
4. Penerapan teknologi budidaya yang lebih produktif, seperti sistem bioflok dan manajemen pakan yang efisien untuk meningkatkan hasil produksi.
5. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan, guna meningkatkan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pemasaran.
6. Pengembangan sistem pemasaran dan hilirisasi produk perikanan, sehingga hasil produksi memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih baik.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung anggaran sebesar Rp 247.023.670,00 dengan realisasi Rp 246,627,661 (99,83%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 396.009 atau 0,17%. Terkait

dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 0,17%. (capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99,83%). Indikator kinerja ini lebih banyak didukung oleh sumber anggaran dari APBN dan APBD Provinsi berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan untuk kelompok yang diberikan dalam bentuk barang.

Tabel 3.26

Daftar pemberian bantuan benih dan sarana prasarana budidaya ikan Tahun 2025

Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah	Realisasi Kegiatan (%)	Keterangan	Sumber Anggaran
				Rp			
Pokdakan Berkah Lele Wonoteka	Tepusen	Kaloran	Hibah Uang	50.000.000	100	Pokir	APBD Kabupaten
Pokdakan Bunga Desa	Kel. Manggong	Ngadirejo	Hibah Uang	20.000.000	100	Pokir	APBD Kabupaten
Pokdakan Marhaen	Wadas	Kandangan	Hibah Uang	25.000.000	100	Pokir	APBD Kabupaten
Pokdakan Sari Ulam	Kel. Parakan Wetan	Parakan	Hibah Uang	25.000.000	100	Pokir	APBD Kabupaten
Pokdakan Harapan Makmur	Kundisari	Kedu	Hibah Uang	75.000.000	100	Pokir	APBD Kabupaten
Pokdakan Pringtali Farm	Kemiri	Kaloran	Hibah Uang	35.000.000	100	Pokir	APBD Kabupaten

Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah	Realisasi Kegiatan (%)	Keterangan	Sumber Anggaran
				(paket)			
Pokdakan Guna Mina	Kemiriombo	Gemawang	Paket Bioflok	1	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Pokdakan Mina Tanjung	Gandu Kulon	Ngadirejo	Paket Bioflok	1	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Pokdakan Mina Barokah	Pingit	Pringsurat	Paket Bioflok	1	100	BBPBL - Lampung	APBN
Pokdakan Pluteran Jaya	Tepusen	Kaloran	Paket Bioflok	1	100	BBPBL - Lampung	APBN
Pokdakan Agromuda Sindoro	Tuksari	Kledung	Paket Bioflok	1	100	BBPBL - Lampung	APBN
Pokdakan Werdi Lestari	Wonocoyo	Wonoboyo	Paket Bioflok	1	100	BBPBL - Lampung	APBN

Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah	Realisasi Kegiatan (%)	Keterangan	Sumber Anggaran
				(ekor)			
Mina Nero DPL	Kel. Parakan Kauman	Parakan	Benih Ikan Lele	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Barokah	Candimulyo	Kedu	Benih Ikan Lele	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Karman	Watukumpul	Parakan	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Bintang Sembilan	Tlogomulyo	Tlogomulyo	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Pokdakan Sungging Jaya	Sunggingsari	Parakan	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Nila Mina	Danurejo	Kedu	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Bumi Tirta Gemilang	Mandisari	Parakan	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Kencana Selawang	Pagutan	Bulu	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Pokdakan Mina Dadi Jaya	Kel. Temanggung II	Temanggung	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Karya	Nglorog	Pringsurat	Benih Ikan Nila	30.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Pokmaswas Tretes	Jumo		Benih Nilem, Tawes	130.000	100	BBPBAT - Sukabumi	APBN

Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah (Ekor)		Keterangan	Sumber Anggaran
				Jantan	Betina		
Mina Maju	Plosogaden	Candiroto	Calin/ Induk Lele	15	30	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Kanthil Gumuyu	Pakurejo	Bulu	Calin/ Induk Lele	15	30	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Pokdakan Bima	Tempuran	Kaloran	Calin/ Induk Lele	15	30	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Bakungan	Tlogorejo	Temanggung	Calin/ Induk Lele	15	30	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Tani Makmur	Tegalsari	Kedu	Calin/ Induk Lele	15	30	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Sari Rejeki	Ngandong	Parakan	Calin/ Induk Nila	50	170	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Jaya Mandiri	Mondoretro	Bulu	Calin/ Induk Nila	50	170	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Sumber Hasil Mergosari	Tening	Wonoboyo	Calin/ Induk Nila	50	170	BBPBAT - Sukabumi	APBN
Mina Karya	Wonokerso	Tembarak	Calin/ Induk Nila	50	170	BBPBAT - Sukabumi	APBN



Gambar 3.8
Bantuan sarpras perikanan untuk kelompok pembudidaya

b.1.7 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan.

Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha perikanan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Kepatuhan tersebut meliputi pemenuhan aspek legalitas usaha, penerapan standar usaha perikanan yang baik, serta pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi regulasi yang dilakukan oleh perangkat daerah kepada pelaku usaha perikanan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha, maka semakin baik pula tata kelola usaha perikanan yang dijalankan, sehingga dapat mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Secara umum, capaian indikator ini dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain kegiatan sosialisasi regulasi, pembinaan kepada pelaku usaha, monitoring lapangan, serta fasilitasi

pemenuhan perizinan usaha. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pelaku usaha semakin memahami kewajiban serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha perikanan.

Capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	%	na	10	28.57	100	10	100	100
Rata -rata capaian kinerja program						100			100

Sumber : DKPPP Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100% atau kategori “**sangat tinggi**”, indicator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indicator baru. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 100%.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi secara berkelanjutan, sehingga pelaku usaha semakin memahami kewajiban dan ketentuan usaha perikanan.
2. Peran aktif penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam pemenuhan aspek legalitas usaha.
3. Kemudahan akses pelayanan perizinan usaha, yang semakin mempermudah pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya.
4. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, terutama untuk mendukung pemasaran dan

meningkatkan daya saing produk perikanan.

5. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan secara berkala, sehingga mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun beberapa kendala yang masih mempengaruhi pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Masih terbatasnya pemahaman sebagian pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya pada pelaku usaha skala kecil.
2. Keterbatasan jumlah dan jangkauan petugas pengawas, sehingga kegiatan monitoring belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah.
3. Belum optimalnya pelaporan administrasi usaha oleh pelaku usaha, seperti pencatatan produksi maupun pelaporan kegiatan usaha.
4. Persepsi sebagian pelaku usaha bahwa proses perizinan cukup kompleks, sehingga masih terdapat usaha perikanan yang belum memiliki legalitas secara lengkap.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan di lapangan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan pada tahun berikutnya, beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha perikanan mengenai regulasi, standar usaha, serta kewajiban pelaku usaha perikanan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif kepada kelompok pelaku usaha, khususnya bagi usaha perikanan skala kecil agar mampu memenuhi persyaratan usaha yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan perizinan usaha, sehingga proses pengurusan legalitas usaha dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan pengawasan lapangan

secara berkala, guna memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.

5. Mengoptimalkan peran penyuluh perikanan dalam pembinaan dan pengawasan usaha perikanan di wilayah binaan.
6. Mengembangkan sistem pendataan dan pemantauan pelaku usaha perikanan secara lebih terintegrasi, guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, khususnya dalam penyediaan sumber protein hewani yang berasal dari ikan. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan, kegiatan produksi perikanan dapat berjalan secara lebih teratur dan berkelanjutan.

Pengelolaan usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan juga dapat mencegah praktik usaha yang berpotensi merusak sumber daya perikanan. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya perikanan dapat tetap terjaga sehingga ketersediaan bahan pangan berupa ikan bagi masyarakat dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Selain itu, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha juga mendorong penerapan praktik usaha perikanan yang lebih baik, sehingga hasil perikanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Kondisi ini secara tidak langsung mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi.

Pelaksanaan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi sektor perikanan daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan usaha yang berlaku, kegiatan usaha perikanan dapat berjalan secara lebih tertib dan memiliki kepastian hukum yang lebih baik.

Legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan juga membuka peluang yang lebih luas dalam mengakses pasar, baik di tingkat lokal maupun regional. Produk perikanan yang dihasilkan oleh

pelaku usaha yang telah memenuhi standar usaha dan memiliki legalitas yang jelas akan lebih mudah diterima oleh pasar serta memiliki daya saing yang lebih baik.

Selain itu, tertibnya administrasi usaha perikanan juga mendukung penyediaan data usaha yang lebih akurat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan sektor perikanan. Dengan demikian, program-program pembangunan sektor perikanan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam jangka panjang, peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola sektor perikanan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas usaha perikanan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 0 dengan realisasi Rp 0. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%.



Gambar 3.9

Jemput bola pembinaan kelompok usaha perikanan

b.1.8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator Jumlah Produksi Pengolahan Ikan menggambarkan total volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha pengolahan ikan dalam kurun waktu tertentu. Produk olahan tersebut dapat berupa berbagai jenis olahan seperti ikan asap, ikan asin, abon ikan, bakso ikan, nugget ikan, kerupuk ikan, maupun bentuk olahan lainnya yang memiliki nilai tambah dibandingkan produk ikan segar.

Dalam pelaksanaan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai perkembangan kegiatan pengolahan hasil perikanan di daerah. Peningkatan jumlah produksi pengolahan ikan menunjukkan adanya perkembangan usaha pengolahan hasil perikanan, meningkatnya pemanfaatan bahan baku ikan, serta meningkatnya nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan juga memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor perikanan. Selain itu, kegiatan pengolahan ikan juga dapat memperpanjang masa simpan produk perikanan, memperluas jangkauan pemasaran, serta meningkatkan diversifikasi produk olahan yang diminati oleh masyarakat.

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Capaian 2025 (%)	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	na	395,752	395.752	100	395.76	100	99,99
Rata -rata capaian kinerja program			na			100			99,99

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100% atau kategori “**sangat tinggi**”, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 99,99%.

Tabel 3.29

Capaian Jumlah produksi pengolahan ikan 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah produksi pengolahan ikan (ton)	395,749	395,750	395,752	395,752	395.752

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah produksi pengolahan ikan antara lain:

1. Ketersediaan bahan baku ikan yang cukup, baik dari hasil perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
2. Tingginya minat masyarakat terhadap produk olahan ikan, yang praktis, bergizi, dan memiliki variasi produk yang beragam.
3. Adanya pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan, yang meningkatkan keterampilan dalam pengolahan dan pengemasan produk.
4. Dukungan program pemerintah daerah, seperti bantuan peralatan pengolahan, fasilitasi sertifikasi produk, serta pendampingan usaha.
5. Semakin berkembangnya akses pemasaran, baik melalui pasar tradisional, toko oleh-oleh, maupun pemasaran secara digital.

Meskipun demikian, dalam pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peningkatan produksi, antara lain:

1. Ketersediaan bahan baku ikan yang belum stabil sepanjang tahun, terutama pada saat musim tertentu.
2. Keterbatasan peralatan pengolahan yang masih sederhana, sehingga kapasitas produksi pelaku usaha masih terbatas.

3. Keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, yang menghambat pengembangan skala usaha.
4. Masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam pengemasan dan pemasaran produk, sehingga daya saing produk olahan masih perlu ditingkatkan.
5. Belum semua pelaku usaha memiliki sertifikasi produk, seperti izin edar atau standar keamanan pangan, yang menjadi syarat untuk memperluas pasar.

Untuk meningkatkan jumlah produksi pengolahan ikan dan memperkuat pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan, terutama terkait diversifikasi produk, teknik pengolahan, dan pengemasan yang lebih menarik dan higienis.
2. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan, guna meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi proses pengolahan.
3. Mendorong peningkatan kualitas dan standar produk olahan, melalui fasilitasi sertifikasi keamanan pangan seperti izin edar dan standar mutu produk.
4. Pengembangan strategi pemasaran produk olahan perikanan, baik melalui promosi produk lokal, pameran, maupun pemanfaatan platform pemasaran digital.
5. Penguatan kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, sehingga pelaku usaha dapat saling mendukung dalam pengadaan bahan baku, produksi, maupun pemasaran.
6. Meningkatkan sinergi dengan sektor lain, seperti sektor pariwisata dan UMKM, untuk memperluas pasar produk olahan perikanan.

Tabel 3.30
Daftar Penerima Sarana Pengolahan hasil perikanan tahun 2025

Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah	Realisasi	Keterangan	Sumber Anggaran
				(Unit)	Kegiatan (%)		
Poklaksar Rizky Seafood	Bengkal	Kranggan	Chest Freezer	1	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklaksar Sudut Bahari	Tembarak	Tembarak	Chest Freezer	1	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklaksar Lele Mina Brana	Guntur	Temanggung	Chest Freezer	2	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklaksar Kurtina Sanse	Gambasan	Selopampang	Chest Freezer	2	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklaksar Puspa Arum	Kruwisan	Kledung	Peralatan Pengolahan Keripik	1	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN

Pelaksanaan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor perikanan. Kegiatan pengolahan ikan mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan, sehingga harga jual produk menjadi lebih tinggi dibandingkan ikan segar.

Selain itu, pengembangan usaha pengolahan ikan juga membuka peluang lapangan kerja baru, terutama bagi masyarakat di sekitar sentra produksi perikanan. Dengan berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan produk olahan perikanan juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat. Produk olahan ikan yang lebih praktis, beragam, dan memiliki masa simpan lebih lama dapat menjadi alternatif konsumsi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengolah ikan segar.

Dengan semakin berkembangnya diversifikasi produk olahan perikanan, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara lebih luas. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung anggaran sebesar Rp 7.641.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.538.855 atau 98,65%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 98,65% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,35%. Program ini dibantu dari APBN dan APBD propinsi.



Gambar 3.10

Penyerahan Bantuan Freezer untuk Poklhasar

b.1.9 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diukur dengan 15 indikator.

Adapun 15 indikator itu terdiri dari 4 sub bidang yaitu :

1. Tanaman pangan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada subsektor tanaman pangan merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya dalam peningkatan produktivitas komoditas utama seperti padi dan jagung. Kedua komoditas tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah serta mendukung peningkatan pendapatan petani.

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Tanaman pangan yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Padi dan Jagung.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (kwintal) dibagi luas tanam (Hektar).

2. Hortikultura

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada subsektor hortikultura merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan pertanian daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan produktivitas komoditas hortikultura strategis seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai keriting. Komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mendukung pendapatan petani.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar.

3. Perkebunan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada subsektor perkebunan merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya dalam mendorong peningkatan produktivitas komoditas perkebunan unggulan daerah seperti tembakau, kopi arabika, dan kopi robusta. Komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat petani di wilayah sentra produksi.

Definisi perkebunan menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim/tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Tanaman perkebunan dapat dikelompokkan menjadi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh selama satu musim pada tahun tersebut atau bisa dikatakan tumbuhan tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Tanaman tahunan adalah suatu tumbuhan yang dapat tumbuh lebih dari dua tahun bahkan lebih dari puluhan

tahun. Tanaman tahunan biasanya merujuk pada tumbuhan berkayu keras.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tembakau, kopi robusta, kopi arabika

4. Peternakan

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak melalui penyediaan sarana produksi peternakan yang memadai, peningkatan kualitas bibit, serta penguatan manajemen pemeliharaan ternak oleh peternak. Program ini berperan strategis dalam mendorong peningkatan produksi komoditas peternakan yang meliputi produksi daging ternak besar, daging ternak kecil, daging unggas, produksi telur, serta peningkatan persentase kelahiran pedet.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Program Penyediaan Dan Pengembangan
sarana Pertanian Tahun 2025

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	Produktivitas Padi	ton/ha	100	6.15	6.09	99	6.19	6.09	98,4
2	Produktivitas jagung	ton/ha	100	5.5	5.05	91.82	5.75	5.05	87,8
3	Produktivitas bawang putih	ton/ha	100	6.05	7.163	100	6.18	7.163	100
4	Produktivitas bawang merah	ton/ha	100	6.8	8.14	100	7.13	8.14	100
5	Produktivitas cabai rawait	ton/ha	100	7	7.38	100	7,04	7.38	100
6	Produktivitas cabai keriting	ton/ha	100	7	7.56	100	7.04	7.56	100
7	Produktivitas tembakau	ton/ha	100	0.640	0.6719	100	0.65	0.6719	100
8	Produktivitas kopi robusta	ton/ha	100	0.702	0.730	100	0.708	0.730	100

9	Produktivitas kopi arabika	ton/ha	85	0.4	0.560	100	0.425	0.560	100
10	Jumlah produksi daging ternak besar	Kg	na	806.130	1,160,527.20	100	812,214	1,160,527.20	100
11	jumlah produksi daging ternak kecil	Kg	na	267,584	417,341.82	100	269,690	417,341.82	100
12	jumlah produksi ternak unggas	Kg	Na	6,230,875	6,537,554	100	6,280,872	6,537,554	100
13	Jumlah produksi telur		na	6,860,985	8,888,810.54	100	6,881,588	8,888,810.54	100
14	Persentase kelahiran pedet	%	95,09	48	64.15	100	48	64.15	100
15	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	na	36.1	28.86	79.9	40.24	28.86	71,7
	Rata-rata capaian indikator program					99,82%			97,19

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program Tahun 2025 sebesar 99,82% atau kategori **“sangat tinggi”** dibandingkan tahun sebelumnya tidak dapat dibanding kan karena ada beberapa indicator baru, dibandingkan target akhir Renstra rata-rata capaian kinerja telah tercapai 97,19%. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Tanaman Pangan

Tabel 3.32

Tabel produksi, produktivitas dan luas panen Tanaman Pangan
Tahun 2020-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktifitas Padi	Kw/ha	59	59	63,15	63,46	61,49	60,9
Total Produksi	Kw	1.561.057	1.212.627	1.059.927	1.144.717	910.222	1.005.823
Luas panen	ha	26.459	20.554	16.784	18.039	14.802	16.516
Produktifitas Jagung	Kw/ha	49	45	46,1	46,00	57,6	50,5
Total Produksi	Kw	549.854	386.114	263.446	386.195	360.574	391.193
Luas panen	ha	11.222	8.580	5.715	8.396	6.264	7.746,40

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi padi dan jagung serta luas panen kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan, kemudian di Tahun 2025 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adanya target penambahan luas areal tanam dengan bantuan kegiatan Pembangunan/rehabilitasi irigasi usaha pertanian. Tahun 2025 untuk produksi padi sebesar 1.005.823 kw dan jagung sebesar 391.193 kw, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan produksi padi sebesar 95.601 kw dengan kenaikan luas panen padi sebesar 1.714 ha dan kenaikan produksi jagung sebesar 30.619 kw dan luas panen jagung sebesar 1.482,4 ha.

Produktivitas padi dan jagung menggambarkan tingkat kemampuan lahan dalam menghasilkan produksi per satuan luas lahan (ton per hektar). Peningkatan produktivitas mencerminkan keberhasilan pemanfaatan sarana produksi pertanian, teknologi budidaya, serta pengelolaan usaha tani yang lebih efisien. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan.

Secara umum, peningkatan produktivitas padi dan jagung menunjukkan bahwa intervensi program penyediaan sarana pertanian telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pertanian. Hal ini juga mencerminkan meningkatnya kemampuan petani dalam mengoptimalkan penggunaan sarana produksi serta penerapan teknologi budidaya yang lebih baik.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan produktivitas padi dan jagung antara lain:

1. Ketersediaan benih unggul yang memiliki potensi hasil tinggi dan lebih tahan terhadap hama serta penyakit tanaman.
2. Dukungan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, dan alsintan yang membantu meningkatkan efisiensi proses budidaya.

3. Peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pendampingan, sehingga petani dapat menerapkan teknologi budidaya yang lebih tepat.
4. Kondisi lahan dan sistem irigasi yang relatif mendukung, terutama pada lahan sawah yang memiliki ketersediaan air yang cukup, bantuan Pembangunan/rehabilitasi irigasi usaha tani (perpompaan).
5. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan produksi pangan, termasuk program bantuan sarana produksi, peningkatan HPP padi dan jagung diharapkan dapat menstimulasi petani tanaman pangan, kenaikan harga beras di tingkat konsumen menyebabkan petani menanam padi minimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga sendiri,

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan produktivitas padi dan jagung, antara lain:

1. Perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca, yang mempengaruhi pola tanam serta risiko kekeringan atau banjir.
2. Keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi atau distribusi yang belum sepenuhnya tepat waktu.
3. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil produksi.
4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang berpotensi mengurangi luas lahan produksi tanaman pangan.
5. Keterbatasan regenerasi petani dan adopsi teknologi, dimana sebagian petani masih menggunakan metode budidaya konvensional.

Untuk meningkatkan efektivitas program serta mengatasi berbagai kendala yang ada, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Memperkuat kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dalam penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang lebih produktif dan ramah lingkungan.

3. Pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk varietas tahan kekeringan dan tahan hama.
4. Penguatan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) untuk meminimalkan kerugian akibat serangan OPT.
5. Pengembangan mekanisasi pertanian, khususnya penggunaan alsintan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan produktivitas lahan.

Keberhasilan peningkatan produktivitas padi dan jagung memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, karena hasil panen yang meningkat akan berdampak pada peningkatan nilai produksi.
2. Menjaga stabilitas ketersediaan pangan daerah, terutama beras dan jagung sebagai komoditas pangan strategis.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.
4. Mengurangi risiko kerawanan pangan, karena produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
5. Menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor pendukungnya, seperti pengolahan hasil dan distribusi pangan.

Peningkatan produktivitas padi dan jagung juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai indikator pembangunan daerah lainnya, seperti peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi pangan, serta peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.33
Perbandingan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Tingkat Regional

KOMODITAS	PRODUKSI (kw)			
	PURWOREJO	KAB. MAGELANG	MAGELANG	TEMANGGUNG
Padi	2.877.214,50	1.606.946,20	6.464,30	1.005.823
Jagung	-	190.310,00	0,60	391.193

Data Tingkat regional masih menggunakan data 2024, karena data statistic dari BPS belum rilis.



Gambar 3.11

Panen raya Serentak Kuartal III

2. Hortikultura

Produktivitas hortikultura mencerminkan tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya produksi, baik lahan, sarana produksi, maupun teknologi budidaya. Peningkatan produktivitas komoditas hortikultura menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui penyediaan sarana produksi seperti benih/bibit unggul, pupuk, pestisida, sarana pengendalian hama penyakit, serta dukungan teknologi budidaya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha tani hortikultura.

Selain itu, pengembangan hortikultura memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanaman pangan karena bersifat lebih sensitif terhadap perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, serta fluktuasi harga pasar. Oleh karena itu, keberhasilan

program ini juga mencerminkan kemampuan petani dan pemerintah daerah dalam mengelola risiko produksi dan pasar secara lebih adaptif. Adapun rincian realisasi kinerja seperti table dibawah ini

Tabel 3.34
Tabel produksi, produktivitas dan luas panen komoditas hortikultura Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktivitas bawang putih	Kw/ha	65,84	65,1	69,16	71,41	73,02	71,63
Total Produksi		120326,35	91594,1	74902	120326,35	91594,1	68.980
luas panen		365,6	278,3	220,3	365,6	278,3	963
Produktivitas bawang merah	Kw/ha	73,604	71,4	81	76,65	76,50	81,4
Total Produksi		91.711	111.021	186.624	179.018	212.631,8	229.327
luas panen		1.246	1.555	2.304	2.336	2.779,5	2.816,5
Produktivitas cabai rawit	Kw/ha	69,968	69,87	76,36	75,5	75,0	73,8
Total Produksi		183.457	208.029	385.254	520.950	568.762,0	734.128,85
luas panen		2.622	2.978	5.046	6.900	7583,5	9.944,85
Produktivitas cabai keriting	Kw/ha	72,101	70,57	79,04	77,53	75,98	75,6
Total Produksi		115.980,0	125.856,4	105.626,1	1145538	285.798	348.177,65
luas panen		17.102,0	18.293,1	15.801,2	14.764,1	3.761	4.605,52

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2025 produksi bawang putih 68.980 kw dengan luas panen 963ha, secara produksi menurun dibanding tahun 2024 (91.594,1 kw) tapi secara luas panen mengalami peningkatan. Penurunan produksi dipengaruhi perubahan iklim dan serangan hama penyakit. Produksi bawang merah Tahun 2025 sebanyak 229.327 kw dengan luas panen 2.816,5 Ha, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2024 produksi sebanyak 212.631,8 kw dengan luas panen 2.779,5 ha, hal ini dipengaruhi antusias petani untuk menanam karena harga jual yang tinggi dalam beberapa waktu serta penerapan GAP dan GHP yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Produksi cabai rawit Tahun 2025 sebanyak 734.128,85 kw dengan luas panen 9.944,85 ha, dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi cabai rawit 568.762 kw dengan

luas panen 7583,5 ha mengalami peningkatan, karena harga jual yang tinggi dalam beberapa waktu sehingga animo Masyarakat tinggi untuk menanam cabai yang berpengaruh juga pada penerapan GAP dan GHP yang semakin baik dari tahun sebelumnya supaya lama waktu panen makin panjang. Produksi cabai keriting Tahun 2025 sebanyak 348.177,65 kw, dengan luas panen 4.605,52 ha dibandingkan tahun sebelumnya produksi cabai sebesar 285.798 kw dengan luas panen 3.761 ha mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena harga jual yang tinggi dalam beberapa waktu sehingga animo masyarakat tinggi untuk menanam cabai yang berpengaruh juga pada penerapan GAP dan GHP yang semakin baik dari tahun sebelumnya supaya lama waktu panen makin Panjang.

Kenaikan dan penurunan produksi komoditas hortikultura ini erat kaitannya dengan peralihan komoditas yang dibudidayakan oleh petani (tanaman pangan beralih ke hortikultura, tembakau beralih ke tanaman hortikultura) yang di sebabkan meningkatnya animo/trend petani untuk budidaya tanaman hortikultura karena harga jual yang tinggi (cenderung stabil untuk bawang merah) dalam jangka waktu yang lama serta tata niaga tanaman hortikultura yang jelas dibanding dengan komoditas yang lain.

Peningkatan produktivitas bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai keriting menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan teknologi budidaya serta pemanfaatan sarana produksi yang lebih optimal. Produktivitas yang meningkat mengindikasikan bahwa petani mampu mengoptimalkan penggunaan lahan serta mengelola faktor produksi secara lebih efisien.

Di sisi lain, komoditas hortikultura memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi pangan, karena cabai dan bawang merupakan komoditas yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan pokok. Dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan pasokan komoditas hortikultura di tingkat daerah dapat lebih stabil sehingga

mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan produktivitas komoditas hortikultura antara lain:

- 1 Ketersediaan benih atau bibit unggul hortikultura yang memiliki produktivitas tinggi dan lebih adaptif terhadap kondisi agroklimat setempat.
- 2 Dukungan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, mulsa, dan sarana budidaya lainnya yang membantu meningkatkan efisiensi produksi.
- 3 Pendampingan dan penyuluhan kepada petani hortikultura dalam penerapan teknologi budidaya yang baik (Good Agricultural Practices).
- 4 Kondisi agroklimat yang mendukung, khususnya pada wilayah dataran tinggi yang sangat cocok untuk pengembangan komoditas hortikultura.
- 5 Tingginya permintaan pasar terhadap komoditas hortikultura, yang mendorong petani untuk meningkatkan intensitas dan kualitas budidaya. lama, kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang merah dan champion cabai melalui APBN.

Faktor penghambat peningkatan produksi tanaman hortikultura seperti :

1. Perubahan iklim menyebabkan jadwal tanam mundur karena keterbatasan ketersediaan air, peningkatan serangan hama dan penyakit,
2. Masuknya bawang putih impor sehingga konsumen lebih memilih bawang putih impor dengan umbi yang berukuran besar daripada bawang putih local serta belum kompetitifnya harga bawang putih local (harga jual bawang putih local kurang sebanding dengan biaya produksi/usaha tani),
3. Harga saprodi yang terus naik,
4. Penerapan GAP dan GHP yang belum sesuai,

5. Bawang merah belum punya kemandirian produk benih, harga benih bawang merah pada saat musim tanam cenderung mahal,
6. Tenaga kerja pertanian yang mahal,
7. Terbatasnya pilihan varietas cabai yang memiliki adaptasi luas dan tahan OPT,
8. Terbatasnya pengembangan bawang merah off season khususnya penanaman pada musim penghujan, penerapan budidaya menggunakan biji atau True Shailot Seed (TSS) yang masih terbatas (Bawang merah),
9. Penggunaan sarana pengendali OPT ramah lingkungan belum optimal (penggunaan pestisida terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah),
10. Kenaikan harga saprodi terutama benih (bawang merah) dan pupuk yang menyebabkan biaya produksi semakin tinggi

Untuk mengatasi hal tersebut dan mempertahankan produksi dilakukan beberapa langkah yaitu:

- 1 Pengembangan Kawasan hortikultura strategis dengan Kerjasama para petani champion cabai dan bawang merah yang dapat berkontribusi dalam pemenuhan pasokan dan pengendalian inflasi (APBN),
- 2 Kerjasama dengan BRIN untuk kajian komoditas bawang putih, bawang merah dan cabai, melaksanakan pengembangan bawang putih lokal varietas Geol Temanggung Agrihorti, dimana varietas tersebut memiliki ukuran umbi yang lebih besar dibanding varietas bawang putih lokal lainnya,
- 3 Peningkatan jejaring pemasaran,
- 4 Pendampingan dan fasilitasi bantuan sarana prasarana pra panen dan pasca panen,
- 5 Penanganan hama dan penyakit secara lebih dini dan pelatihan GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP yang benar,
- 6 Pelatihan pembuatan pupuk organik gunaantisipasi kelangkaan pupuk di pasaran,
- 7 Bimtek pengolahan pasca panen komoditas hortikultura,

- 8 Monitoring realisasi alokasi pengembangan kawasan komoditas strategis berikut rencana panen dan produksinya.
- 9 KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait info iklim dari BMKG sebagai early warning system (EWS) khususnya musim penghujan untuk menjaga stabilitas produksi dimusim hujan.

Rekomendasi kedepan untuk mempertahankan produksi komoditas hortikultura strategis yaitu pengembangan Kawasan hortikultura strategis dengan tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat serta mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan pengembangan kompetensi petani dan penyuluh, peningkatan fasilitasi bantuan saprodi dan sarpras pra panen dan pasca panen, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.

Keberhasilan peningkatan produktivitas komoditas hortikultura memberikan berbagai manfaat strategis bagi masyarakat, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani hortikultura, karena komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi.
2. Menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis, khususnya cabai dan bawang yang sangat mempengaruhi inflasi daerah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor pertanian dan perdagangan hasil pertanian.
4. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, karena komoditas hortikultura merupakan sumber penting vitamin dan mineral.
5. Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja di sektor pertanian dan agribisnis hortikultura.

Secara strategis, pengembangan hortikultura memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan daerah yang berorientasi pasar. Peningkatan produktivitas komoditas hortikultura tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga memiliki efek

multiplier terhadap sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, transportasi, dan pengolahan hasil pertanian.

Oleh karena itu, keberlanjutan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pada subsektor hortikultura perlu terus diperkuat melalui pendekatan pengembangan kawasan hortikultura terpadu, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan sistem agribisnis hortikultura yang berdaya saing.

Tabel 3.35
Perbandingan Produksi Komoditas Hortikultura tahun 2025 tingkat Regional

KOMODITAS	PRODUKSI (kw)			
	PURWOREJO	KAB. MAGELANG	KOTA MAGELANG	TEMANGGUNG
Bawang Putih	-	30.619,00	-	68.980
Bawang Merah	207,00	12.429,00	-	229.327
Cabe Rawit	4.993,00	542.257,00	64,00	734.128,85
Cabe Besar	8.135,00	36.621,00	-	348.177,65



Gambar 3.12

Panen Bawang putih dan bawang merah

3. Perkebunan

Tabel 3.36

Tabel produksi, produktivitas dan luas panen komoditas Perkebunan Tahun 2020-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktivitas tembakau	Kw/ha	6,782	6,88	6,68	6,56	6,70	6,719
Total Produksi		78.131,4	83.829,9	89.943,2	84.769,0	94.389,6	88.242
luas panen		11.506,8	11.724,5	12.977,4	12.972,2	14.088,0	13.133,5
Produktivitas kopi robusta	Kw/ha	6,79	7,15	6,93	6,53	7,44	7,30
Total Produksi		78.131,43	83.829,89	89.943,21	84.769,00	83.294,36	81.715,4
luas panen		11.506,84	11.724,46	12.977,37	12.972,20	11.193,97	11,193.9
Produktivitas kopi arabika	Kw/ha	6,2	6,11	5,9	5,75	5,51	5,6
Total Produksi		8.487,61	9.558,24	10.029,70	9.924,34	6.492,88	6.592,8
luas panen		1.368,97	1.564,36	1.699,95	1.724,95	1.177,33	1,177

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja komoditas tembakau Tahun 2025 sebanyak 88.242 kw dengan luas panen 12.133,5 ha dibandingkan tahun Tahun 2024 sebesar 94.389,6 kw dengan luas panen sebesar 14.088,0 ha, terjadi penurunan produksi dan luas panen. Hal ini disebabkan animo masyarakat yang menurun dikarenakan kepastian/trend harga yang tiap tahun tidak ada perbaikan sementara biaya produksi tinggi. Realisasi kinerja kopi robusta Tahun 2025 produksi sebesar 81.715,4 kw dengan luas panen 11,193.9 kw, dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 83.294,36 kw dan luas panen sebesar 11.193,97 ha, terjadi penurunan produksi dan kopi arabica produksi tahun 2025 sebanyak 6.592,8 kw dengan luas panen 1,177 ha dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 6.492,88 kw dan luas panen sebesar 1.177,33 ha, terjadi keiangan produksi.

Adapun faktor pendorong indikator komoditas perkebunan diantaranya:

1. Kondisi geografis dan iklim mendukung untuk pertumbuhan kopi robusta, kopi arabika dan tembakau,
2. Harga kopi yang baik membuat petani bergairah untuk menanam serta melakukan peremajaan tanaman kopi,
3. Kemampuan berbudidaya sudah cukup dikuasai oleh petani,
4. Peningkatan jejaring pemasaran dengan pihak luar,
5. Fasilitasi bantuan saprodi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi kopi guna peningkatan produksi,
6. Menanam tembakau sudah menjadi budaya masyarakat temanggung, adanya kemitraan dengan perwakilan Perusahaan tembakau dalam hal budidaya dan pemasaran, GAP sudah dikuasai dengan baik oleh petani, ketersediaan varietas unggul Lokasi (Kemloko 1-8) yang dibagikan gratis kepada Masyarakat, animo masyarakat untuk konservasi lahan kritis di lereng gunung sumbing, tembakau dan prau dengan komoditas kopi arabica.

Faktor penghambat terkait dengan penurunan luas panen dan produksi komoditas tembakau disebabkan karena perubahan cuaca/iklim berpengaruh pada jadwal tanam, tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen, pada masa pertumbuhan), tata niaga yang tidak jelas sehingga kepastian harga yang tidak menentu (cenderung turun setiap tahun) mengakibatkan petani beralih ke komoditas yang lain yang lebih menguntungkan (hortikultura), harga saprodi yang mahal serta tenaga kerja pertanian yang mahal dan semakin terbatas mengakibatkan biaya usaha tani menjadi naik/mahal.

Faktor penghambat pada komoditas kopi robusta diantaranya banyaknya kopi yang sudah tua perlu diremajakan, perubahan iklim berpengaruh terhadap proses vegetatif dan generatif (pembungaan) menjadi terganggu sehingga produktivitas kopi turun hampir 40 % - 50 %, peningkatan serangan hama penyakit utamanya penggerek

buah kopi (PBKo), belum adanya standart harga kopi (kopi organik dengan dengan kopi asalan tidak terpaut jauh) sehingga petani kurang berminat untuk budidaya kopi organic, dan untuk kopi arabica densitas tanaman kurang (kerapatan tanaman kurang) sehingga provitas untuk setiap luasan belum optimal, pola tanam kopi arabica sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produksi meningkatkan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) terkait dengan informasi cuaca dari BMKG untuk menentukan masa tanam, pemberian bantuan pupuk NPK, ZA, pupuk organik dan bibit unggul untuk tanaman tembakau dan kopi, pelaksanaan program peremajaan tanaman kopi (khususnya robusta), peningkatan GAP dan GHP, peningkatan jejaring pemasaran, peningkatan gerakan pengendalian hama dan penyakit, bantuan bibit kopi dan entres untuk peremajaan, pembibitan tembakau untuk menambah densitas/kerapatan, fasilitasi serta pendampingan oleh PPL secara intensif, pemberian bantuan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen.

Tabel 3.37

Perbandingan Produksi Komoditas Perkebunan Tingkat Regional

KOMODITAS	PRODUKSI (kw)			
	KAB. PURWOREJO	KAB. MAGELANG	KOTA MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG
Kopi Robusta	17.590,49	17.493,00	-	81.715,4
Kopi Arabika	-	942,6	-	6.592,8
Tembakau	36.342,50	19.100,00	-	88.242

Data Kabupaten Purworejo, Kab Magelang dan kota Magelang masih menggunakan data tahun 2024 karena data tahun 2025 belum rilis.



Gambar 3.13
Gerakan pengendalian OPT Tembakau

4. Peternakan

Tabel 3.38

Tabel produksi komoditas Peternakan Ruminansia Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Daging Ternak Besar (kg)	637.468	775.372	741.741	876.941	804.609	1.160.527,20

Capaian indikator **jumlah produksi daging ternak besar** menunjukkan bahwa ketersediaan sarana produksi seperti bibit unggul, pakan, serta dukungan layanan reproduksi ternak memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan bobot potong dan populasi ternak. Peningkatan produksi pada indikator ini mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam memperkuat kapasitas peternak serta memperbaiki sistem pemeliharaan ternak besar. Namun demikian, capaian produksi

masih dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis seperti ketersediaan pakan hijauan, tingkat produktivitas indukan, serta pola pemeliharaan yang masih didominasi sistem tradisional.

Pencapaian yang baik, didukung oleh faktor pendorong antara lain penggunaan bibit sapi potong unggul yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas, didukung manajemen pakan bergizi yang mempercepat pertumbuhan ternak. Selain itu, pengendalian penyakit dan perawatan kesehatan hewan yang baik berperan penting dalam menekan angka kematian. Ketersediaan infrastruktur peternakan yang memadai juga meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Akses pasar yang stabil turut mendorong motivasi peternak untuk meningkatkan produksi, ditambah pelatihan dan edukasi mengenai manajemen modern yang memperkuat kapasitas peternak.

Faktor penghambat produksi ternak besar meliputi keterbatasan lahan penggembalaan yang membatasi jumlah ternak yang dapat dipelihara, serta keterbatasan pakan berkualitas yang menurunkan produktivitas. Penyakit ternak juga menjadi ancaman serius karena dapat mengurangi populasi ternak yang sehat. Selain itu, akses yang terbatas terhadap bibit unggul dan tingginya biaya produksi menekan keuntungan peternak. Keterbatasan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas penyimpanan, turut menghambat distribusi dan pemasaran. Fluktuasi harga daging serta keterbatasan akses ke pasar menurunkan stabilitas pendapatan peternak. Di sisi lain, minimnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen modern juga berdampak pada rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.

Upaya pencapaian produksi daging ternak besar dilakukan melalui penggunaan bibit sapi potong unggul untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas daging, serta penerapan manajemen pakan yang baik guna memastikan kebutuhan nutrisi ternak terpenuhi. Penguatan manajemen kesehatan hewan, termasuk pengendalian penyakit dan perawatan rutin, juga menjadi langkah

penting untuk menekan angka kematian. Selain itu, pengembangan infrastruktur peternakan seperti kandang yang memadai dan fasilitas pengolahan pakan turut meningkatkan efisiensi produksi. Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada peternak mengenai teknologi peternakan modern mendorong peningkatan kualitas usaha. Pembukaan dan pengembangan akses pasar membantu memperluas peluang penjualan, sementara kemitraan antara peternak, pemerintah, dan industri dapat memperkuat rantai produksi. Pemanfaatan teknologi, baik informasi maupun bioteknologi, turut meningkatkan efisiensi. Di samping itu, pengembangan usaha peternakan rakyat juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan produksi daging ternak besar serta pendapatan masyarakat.

Tabel 3.39
Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil	239.423	235.170	260.442	251.790	267.057	417.341,82

Jumlah produksi daging ternak kecil merupakan indikator yang menggambarkan total hasil produksi daging yang berasal dari ternak kecil, seperti kambing, domba, dan kelinci, dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas produksi, ketersediaan daging ternak kecil, serta kontribusinya terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat maupun sektor peternakan daerah

Target jumlah produksi daging ternak kecil tahun 2025 ditetapkan sebesar 267.584 kg, sementara realisasi hingga mencapai 417.341,82 kg, sehingga capaian telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa produksi daging ternak kecil mengalami peningkatan signifikan. Pada indikator **jumlah produksi daging**

ternak kecil, peningkatan produksi dipengaruhi oleh perkembangan populasi kambing dan domba yang relatif cepat serta adaptif terhadap kondisi lingkungan. Dukungan sarana peternakan berupa bantuan bibit, penguatan kandang kelompok, dan peningkatan manajemen pakan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ternak kecil. Namun demikian, fluktuasi harga pakan dan keterbatasan akses terhadap bibit unggul masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi.

Faktor pendorong produksi daging ternak kecil meliputi penggunaan bibit unggul yang meningkatkan kualitas dan produktivitas, manajemen pakan bergizi yang menunjang pertumbuhan ternak, serta manajemen kesehatan hewan yang baik untuk menekan angka kematian. Infrastruktur peternakan yang memadai turut mendukung efisiensi produksi, pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi modern, sementara pasar yang stabil meningkatkan motivasi peternak.

Faktor penghambat produksi daging ternak kecil antara lain keterbatasan lahan penggembalaan yang membatasi jumlah ternak, serta keterbatasan pakan berkualitas yang menurunkan produktivitas. Penyakit ternak juga menjadi ancaman yang mengurangi populasi ternak sehat, ditambah kurangnya akses terhadap bibit unggul. Biaya produksi yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur menghambat efisiensi distribusi serta pemasaran. Selain itu, fluktuasi harga dan minimnya akses pasar menurunkan stabilitas pendapatan peternak. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan peternak turut memperlemah efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi pengembangan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas, disertai manajemen pakan bergizi dan manajemen kesehatan hewan guna menekan penyakit serta kematian ternak. Penguatan infrastruktur peternakan—mulai dari kandang hingga fasilitas pakan—dapat meningkatkan efisiensi usaha. Pendidikan dan pelatihan bagi peternak, serta penggunaan teknologi modern, membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Selain itu, pengembangan pasar, kemitraan antar

pemangku kepentingan, serta penguatan usaha peternakan rakyat menjadi langkah penting untuk memperluas akses usaha dan meningkatkan pendapatan peternak

Tabel 3.40

Tabel produksi komoditas Peternakan Ruminansia Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktivitas ternak sapi (data RPH dan qurban)	Kg/Ekor	176,95	177,2	177,4	177,6	177,6	
Jumlah produksi karkas sapi per tahun		637.468	775.372	737.178	876.265	804.609	
Jumlahh ternak dipotong		3.7720	4.588	4.362	5.185	4.761	
Konstanta		7,95	8,20	8,40	8,60	8,60	
Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,68	13,69	13,7	13,71	13,71	
Jumlah produksi karkas domba pertahun					231.323	227.273	
jumlah domba dipotong pertahun					17.135	16.835	
konstanta					0,18	0,19	
Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,68	13,69	13,7	13,71	13,71	
Jumlah produksi karkas kambing pertahun		8.100	7.898	11.259	9.963	11.772	
jumlah kambing dipotong pertahun		600	585	834	738	872	
konstanta		0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2024 produksi karkas sapi sebesar 804.609 kg dengan jumlah ternak sapi yang dipotong sejumlah 4.761 ekor, produksi karkas domba sebanyak 227.273 kg dan dengan jumlah domba yang di potong sejumlah 16.835 ekor, produksi karkas kambing sebanyak 11.772 kg dengan jumlah kambing yang dipotong sebanyak 872 ekor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi karkas sapi mengalami penurunan sebesar 71.655 kgs dan domba mengalami penurunan sebesar 4.050 kg dan produksi karkas kambing mengalami kenaikan 1.809 kg.

a. Unggas

Tabel 3.41

Capaian kinerja Jumlah produksi ternak unggas dan jumlah produksi telur Tahun 2025

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	jumlah produksi ternak unggas	Kg	Na	6,230,875	6,537,554	100	6,280,872	6,537,554	100
2	Jumlah produksi telur		na	6,860,985	8,888,810.54	100	6,881,588	8,888,810.54	100

Tabel 3.42

Jumlah Produksi Ternak Unggas Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Ternak Unggas	6.914.355,0	7.047.798,0	6.128.440,1	6.147.188,0	6.218.437,50	6.537.554,12

Capaian **jumlah produksi ternak unggas** menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan komoditas ternak lainnya. Hal ini disebabkan oleh siklus produksi unggas yang relatif cepat serta tingginya permintaan pasar terhadap daging ayam. Penyediaan sarana produksi seperti bibit unggas, pakan, serta dukungan teknologi pemeliharaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan populasi dan produksi. Namun demikian, risiko penyakit unggas dan fluktuasi harga pakan masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan sistem biosekuriti dan manajemen usaha peternakan.

Faktor pendorong tercapainya produksi ternak unggas yaitu Peningkatan produksi ternak unggas didorong oleh pemberian nutrisi

yang seimbang, kesehatan ternak yang terjaga melalui vaksinasi dan pengobatan rutin, serta lingkungan kandang yang nyaman dan dikelola baik. Faktor genetik unggul, ketersediaan air dan cahaya yang memadai, serta manajemen pemeliharaan yang baik turut meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengawasan intensif terhadap kesehatan dan performa ternak menjadi kunci dalam memastikan produksi tetap optimal dan berkelanjutan.

Produksi ternak unggas dapat terhambat oleh serangan penyakit dan hama, kekurangan nutrisi, serta kondisi stres pada ternak. Lingkungan kandang yang buruk—termasuk suhu ekstrem, kelembaban tinggi, ventilasi tidak memadai, dan kebersihan yang rendah—juga menurunkan produktivitas. Kandang yang tidak layak dan pengelolaan pemeliharaan yang kurang baik semakin memperburuk performa produksi. Selain itu, cuaca ekstrem dapat menurunkan daya tahan dan produktivitas unggas, sehingga berdampak pada hasil produksi secara keseluruhan.

Tabel 3.43
Jumlah Produksi Telur
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi Telur	368.990,0	362.907,3	365.623,4	8.215.172	347.500,0	8.888.810,54

Target produksi telur tahun 2025 ditetapkan sebesar 6.860.985 kg, sementara realisasi hingga Triwulan IV mencapai 8.888.810,54kg. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi telah mencapai 100% dari target tahunan. Realisasi yang sudah melampaui target ini menggambarkan bahwa kinerja produksi telur sepanjang tahun berjalan sangat baik. Pada indikator jumlah produksi telur, peningkatan produksi dipengaruhi oleh peningkatan populasi ayam petelur serta perbaikan manajemen pakan dan pemeliharaan. Dukungan program melalui penyediaan sarana produksi dan penguatan kelembagaan peternak turut mendorong stabilitas

produksi telur di tingkat peternak. Meskipun demikian, produktivitas telur masih dipengaruhi oleh kualitas bibit, manajemen pakan, serta kondisi kesehatan ternak.

Faktor penghambat produksi telur meliputi serangan penyakit, kurangnya nutrisi, serta stres pada ternak yang menurunkan performa produksi. Lingkungan kandang yang buruk seperti suhu ekstrem, kelembapan tinggi, dan ventilasi tidak memadai juga menjadi kendala utama. Selain itu, kandang yang tidak layak, pengelolaan yang kurang optimal, serangan hama seperti kutu dan cacing, serta kondisi cuaca ekstrem semakin menghambat pencapaian target produksi.

Upaya peningkatan produksi telur dilakukan melalui pemberian nutrisi yang seimbang, pengelolaan lingkungan kandang yang nyaman, serta pengawasan kesehatan dan vaksinasi untuk mencegah penyakit. Manajemen kandang yang baik, pengurangan stres ternak, penggunaan bibit unggul, dan pemantauan produksi secara berkala juga menjadi langkah penting untuk memastikan produktivitas unggas tetap optimal.

Tabel 3.44
Tabel produksi komoditas Peternakan Unggas Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Jumlah produksi karkas ayam pedaging pertahun		6.914.355,0	7.047.798,0	6.128.440,1	6.147.188,0	6.218.437,50
jumlah ternak dipotong pertahun		9.219.140,0	9.397.064,0	8.171.253,5	8.196.251	8.291.250
Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	10,88	10,88	10,26
Jumlah produksi telur per tahun		347.500,0	368.990,0	362.907,3	365.623,4	8.215.172
Jumlah populasi ternak/tahun		496.429	527.128	518.439,0	522.319	755.030

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa tahun 2024 produksi ayam ras pedaging sebesar 6.218.437,50 k dengan jumlah ayam dipotong sebanyak 8.291.250 ekor, produksi ayam petelur 8.215.172 kg dengan jumlah populasi ternak sebanyak 755.030 ekor. Dibandingkan dengan tahun lalu produksi karkas ayam pedaging mengalami kenaikan, begitu juga dengan jumlah produksi telur ayam mengalami naik.

Faktor pendorong indikator diatas adalah ketersediaan bibit yang baik, higiene sanitasi kandang yang baik, tersedianya obat dan vaksin yang baik dan cukup berpengaruh pada produksi karkas ayam pedaging, mutu pakan yang baik. Faktor penghambat untuk pencapaian target yaitu harga saprodi ternak yang mahal. Adapun Upaya untuk pencapaian target dilakukan melalui vaksinasi dan pengobatan bagi hewan yang sakit, memperkuat peran stakeholder dalam penstabilan harga.

b. Persentase kelahiran pedet

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut 'insemination gun'.Persentase kelahiran Pedet merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan inseminasi buatan.

Tujuan Inseminasi Buatan

- Memperbaiki mutu genetika ternak;
- Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya;
- Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama;
- Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur;
- Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin.

Keuntungan Inseminasi Buatan (IB)

- Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan;
- Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik;
- Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding);
- Dengan peralatan dan teknologi yang baik sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama;
- Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati;
- Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar;
- Menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

Kerugian Inseminasi Buatan (IB)

- Apabila identifikasi birahi (estrus) dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat maka tidak akan terjadi terjadi kebuntingan;
- Akan terjadi kesulitan kelahiran (distokia), apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed / turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan / breed kecil;
- Bisa terjadi kawin sedarah (inbreeding) apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama;
- Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik (tidak melalui suatu progeny test).

Tabel 3.45

Tabel Persentase kelahiran pedet Tahun 2021-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase kelahiran pedet	%	na	na	na	48,33	64.15
JUmlah Aseptor IB					3.077	3297
Jumlah Kelahiran Pedet					1.487	2115

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah akseptor IB sebanyak 3297 ekor dengan jumlah kelahiran pedet sejumlah 2.155 ekor (masa kehamilan sapi 9 bulan). Indikator **persentase kelahiran pedet** merupakan indikator penting dalam menggambarkan keberhasilan program peningkatan populasi ternak sapi. Tingkat kelahiran pedet yang meningkat menunjukkan efektivitas program peningkatan reproduksi ternak, termasuk pemanfaatan teknologi reproduksi dan peningkatan kualitas manajemen indukan. Namun demikian, keberhasilan indikator ini sangat dipengaruhi oleh kualitas induk, ketersediaan pakan, serta kemampuan peternak dalam mengelola reproduksi ternak secara optimal.

Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya:

- Kab temanggung sebagai wilayah yang potensial utk pengembangan ternak sapi mengingat faktor geografis yang mendukung terutama ketersediaan pakannya,
- Ketersediaan indukan berkualitas. Populasi sapi betina produktif yang sehat dan berada pada umur reproduktif meningkatkan peluang kebuntingan dan kelahiran.
- Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) yang Optimal. Keberhasilan program IB (ketepatan waktu inseminasi, kualitas semen beku, keterampilan inseminator) sangat menentukan angka kebuntingan.
- Manajemen Pakan yang Baik. ketersediaan pakan hijauan dan konsentrat yang cukup dan bergizi meningkatkan kondisi tubuh induk, sehingga mendukung reproduksi.
- Pelayanan kesehatan hewan. Pengendalian penyakit reproduksi seperti brucellosis, gangguan hormon dan lain-lain meningkatkan tingkat keberhasilan kelahiran.
- Pendampingan dan penyuluhan peternak. Pengetahuan peternak tentang deteksi birahi, perawatan induk bunting, dan penanganan kelahiran sangat berpengaruh.
- Animo masyarakat untuk IB tinggi.

Faktor penghambat pencapaian target diantaranya:

- Rendahnya deteksi birahi oleh peternak (kesalahan atau keterlambatan mendeteksi birahi menyebabkan kegagalan IB atau kawin alam).

- Kualitas pakan yang tidak memadai (kekurangan nutrisi menyebabkan gangguan reproduksi seperti anestrus (tidak birahi) atau keguguran)
- Tingginya kasus gangguan reproduksi (seperti infertilitas, repeat breeding, atau penyakit reproduksi yang menurunkan angka kebuntingan).
- Keterbatasan tenaga dan sarana IB (Jumlah inseminator terbatas, distribusi semen beku tidak merata, serta akses layanan yang sulit).
- Manajemen pemeliharaan tradisional (peternak masih menggunakan sistem pemeliharaan sederhana tanpa pencatatan reproduksi yang baik).
- Tingkat kematian pedet (kelahiran terjadi, tetapi pedet mati karena penanganan pasca lahir yang kurang baik).

Upaya pencapaian target peningkatan keberhasilan kelahiran pedet dilakukan melalui:

1. Peningkatan layanan inseminasi buatan. Penambahan dan peningkatan kapasitas inseminator, penyediaan semen beku berkualitas, perluasan jangkauan pelayanan IB).
2. Perbaikan manajemen pakan. Pengembangan pakan berbasis local.
3. Introduksi teknologi pakan (silase, fermentasi)
4. Penguatan layanan kesehatan hewan (pemeriksaan rutin kesehatan reproduksi, vaksinasi dan pengobatan penyakit, penanganan gangguan reproduksi secara cepat).
5. Peningkatan kapasitas peternak (pelatihan deteksi birahi, edukasi manajemen reproduksi dan kelahiran, pendampingan intensif oleh penyuluh).
6. Penerapan recording dan monitoring (pencatatan siklus reproduksi ternak, monitoring kebuntingan dan kelahiran, evaluasi kinerja IB secara berkala).
7. Penanganan kelahiran dan pedet (pendampingan saat partus (kelahiran), pemberian kolostrum tepat waktu, perawatan pedet untuk menekan kematian).

Dari uraian capaian program diatas didukung dengan anggaran sebesar Rp 18.273.173.157 dengan realisasi Rp 17.811.236.714 (97,47%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 461.936.443 (2,53%).

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sebesar 99,82% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 97,47% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,35%.



Gambar 3.14
Bantuan alat mesin pertanian



Gambar 3.15
Bantuan bibit tembakau

b.1.10 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diarahkan untuk meningkatkan dukungan infrastruktur dasar yang menunjang kegiatan produksi pertanian secara efektif dan berkelanjutan. Prasarana pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran proses produksi, distribusi sarana produksi, serta peningkatan efisiensi usaha tani. Oleh karena itu, keberhasilan program ini diukur melalui indikator **persentase prasarana yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya**.

Capaian indikator tersebut menunjukkan sejauh mana prasarana pertanian yang telah dibangun atau direhabilitasi dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat atau kelompok tani. Tingginya tingkat pemanfaatan prasarana menandakan bahwa pembangunan yang dilakukan telah selaras dengan kebutuhan lapangan, baik dari aspek lokasi, jenis prasarana, maupun keterlibatan kelompok penerima manfaat dalam proses perencanaan dan pemanfaatannya.

Prasarana pertanian adalah infrastruktur pendukung yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan pertanian. Salah satunya dengan fasilitasi pengembangan sumber-sumber air dengan pembangunan jaringan irigasi usaha tani yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya

No	Indikator	Satuan	Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian kinerja s/d tahun 2029 (%)
1	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja indikator program		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya konsisten, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%. Di tahun 2024 sebanyak 70 unit telah dibangun dan dimanfaatkan oleh Masyarakat berupa sumur tanah dangkal/dalam, RJIT, Irigasi perpompaan, Irigasi Perpipaan dan irigasi springkle dari semua sumber anggaran. Tahun anggaran 2025 ini terdampak efisiensi anggaran pusat sehingga dana DAK untuk sarana dan prasarana 0. Akan tetapi masih terdapat 15 unit pembangunan sarana dan prasarana yang didanai baik dari dana DBHCHT dan APBN seperti rincian sebagai berikut:

Tabel 3.47
Data Rekapitulasi Bantuan Prasarana Irigasi Usaha Tani Tahun 2025

No.	NAMA KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	KET
	Irigasi Air Tanah dalam		
1	KT Banjarsari Ngadirejo	DBHCHT APBD II	
2	KT Kertosari Jumo	DBHCHT APBD II	
3	KT Losari Tlogomulyo	DBHCHT APBD II	
4	KT Kataan Ngadirejo	DBHCHT APBD II	
	EMBUNG PERTANIAN		
1	KT Wonosari Bulu	DBHCHT APBD II	
2	KT Tuksari Kledung	DBHCHT APBD II	
3	KT Tlahab Kledung	DBHCHT APBD II	
4	KT Pagersari Tlogomulyo	DBHCHT APBD II	
	RJIT		

1	KT Tegalurung Bulu	DBHCHT APBD I	
2	KT Sukomarto Jumo	DBHCHT APBD I	
3	KT Botoputih Tembarak	DBHCHT APBD I	
4	KT Medari Ngadirejo	DBHCHT APBD I	
Irigasi Perpompaaan APBN			
1	KT Lambang Bibit Gondang Wayang Kedu	APBN	
2	KT Sri Sadono Mergowati Kedu	APBN	
3	KT Rukun Sentoso Pendowo Kranggan	APBN	

Hal yang **mendukung tercapainya indikator kinerja** adalah program pemerintah untuk swasembada pangan membutuhkan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian,

Adapun **hambatan dalam pelaksanaan program** ini adalah jaringan sekunder yang rusak (kewenangan DPUPR), manajemen pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak terencana (kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan/mengelola asset jaringan secara swadaya), Perubahan iklim (hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan debit air tidak sesuai dengan kemampuan kapasitas sarana irigasi untuk menampung air), Sampah yang dibuang di badan air, Prasarana pertanian yang dibangun tidak sesuai dengan kriteria dan kondisi dilapangan , Kurangnya ketersediaan air permukaan khususnya untuk irigasi perpompaaan.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah Koordinasi dengan instansi sesuai dengan kewenangannya (yang menangani jaringan sekunder dan persampahan), Pendampingan kelompok dalam pemeliharaan dan pengelolaan asset, Pembangunan prasarana pertanian sesuai kriteria teknis dan kondisi di lapangan, Verifikasi administrasi dan lapangan, Larangan membuang sampah di saluran irigasi.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 4.983.302.400 dengan realisasi Rp

4.949.342.702 (99,31%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 33.959.698 (0,69%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,31% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0.69%.



Gambar 3.16. Pembangunan Jaringan irigasi usaha tani

b.1.11 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dilaksanakan untuk menjamin kesehatan hewan, mencegah serta mengendalikan penyebaran penyakit hewan, serta memastikan produk hewan dan bahan asal hewan yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan kelayakan konsumsi. Program ini memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha peternakan, melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk peternakan.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan 2 indikator, yaitu :

1. Persentase penanganan penyakit hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit hewan, medik

konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Persentase penanganan penyakit hewan menular adalah persentase jumlah penanganan penyakit oleh pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan petugas kesehatan hewan dibagi jumlah pelaporan kasus penyakit hewan dikalikan 100%.

Pada tahun 2025 penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: avitaminosis, abses, Enteritis, cacingan, Gastritis, Helmintiasis, gangguan reproduksi, demam tiga hari/BEF, Bloat, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), diare, Rhinitis, Scabies, Vulnus, Radang, Jamur, Pneumonia, Keracunan dll.

Tabel 3.48

Realisasi Persentase Penanganan penyakit Hewan Tahun 2020- 2025

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW IV
1	Persentase Penanganan penyakit Hewan	na	96,68	100	97,26	97,43	99,44

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 triwulan IV sebesar 99,44% sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 85%.

Capaian indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini, penanganan kasus, serta pengendalian penyebaran penyakit hewan di wilayah kerja. Penanganan penyakit hewan yang efektif mencerminkan adanya respons cepat dari petugas kesehatan hewan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan, serta meningkatnya kesadaran peternak dalam melaporkan kejadian penyakit pada ternaknya. Keberhasilan pengendalian penyakit hewan juga

berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ternak dan menekan potensi kerugian ekonomi bagi peternak.

Hal-hal yang telah dilaksanakan yaitu *varies day* dengan pasien sebanyak 179 ekor, surveilans flu burung dengan kegiatan meliputi KIE penyakit flu burung dan pengambilan sample darah untuk mengetahui titer antibodi unggas terhadap virus avian influenza, pelayanan kesehatan hewan dengan jumlah layanan 7.527 ekor sapi dan 12.553 domba serta 320 ekor kambing dengan tujuan tindakan preventif pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi pengobatan untuk kasus penyakit dan pemberian obat cacing, vitamin, dan mineral untuk peningkatan daya tahan tubuh ternak, vaksinasi penyakit mulut dan kuku sebanyak 16.670 ekor (sapi 1.525 ekor, domba 14.498 ekor, 842 kambing, 4 ekor kerbau) dengan sebaran vaksinasi di 98 desa di 20 kecamatan, sosialisasi manajemen kesehatan ternak, surveillance residu antibiotik pada produk hewan, surveillance PMK.

Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan, ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis, pelaksanaan program vaksinasi dan pengendalian penyakit secara rutin yang mampu menekan angka kejadian penyakit dan mempercepat penanganan ketika terjadi kasus, meningkatnya kesadaran peternak dalam melaporkan kasus penyakit, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan mencegah penyebaran lebih luas, kebijakan pemerintah daerah yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan dan terencana.

Faktor penghambat keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan hewan yang menyebabkan keterlambatan penanganan kasus, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya ketersediaan obat, vaksin, maupun fasilitas pelayanan yang belum merata, rendahnya tingkat pelaporan dari peternak (akibat

kurangnya pengetahuan atau kesadaran terhadap pentingnya penanganan dini penyakit), luasnya wilayah layanan dan sebaran ternak yang menyulitkan jangkauan pelayanan secara cepat dan merata, potensi munculnya penyakit menular dan zoonosis yang memerlukan penanganan khusus dan sumber daya lebih besar sehingga dapat mempengaruhi capaian indikator secara keseluruhan.

Upaya pencapaian target melalui peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga kesehatan hewan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta optimalisasi peran paramedik veteriner di lapangan, penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan termasuk penyediaan obat-obatan, vaksin, serta pengembangan fasilitas pelayanan seperti puskesmas, peningkatan kegiatan preventif dan promotif seperti vaksinasi massal, surveilans penyakit, dan sosialisasi kepada peternak, pemanfaatan sistem pelaporan dan monitoring berbasis teknologi, untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap kasus penyakit, peningkatan peran serta masyarakat/peternak, melalui penyuluhan dan pendampingan agar lebih aktif dalam melaporkan dan menangani kasus penyakit, penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penanganan penyakit zoonosis yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Tabel 3.49

Rekapitulasi Data Penyakit Hewan Tahun 2025 Triwulan

NO.	JENIS PENYAKIT	JENIS HEWAN					JUMLAH TOTAL
		KUCING	ANJING	DOMBA/ KAMBING	SAPI	LAINNYA	
1	abses	14	0	0	0	1	15
2	arthritis	9	1	0	0	0	10
3	avitaminosis	92	4	6	0	1	103
4	cacingan	2	0	0	0	0	2
5	CRD	0	0	0	0	3	3
6	dermatophytosis	23	0	0	0	0	23
7	enteritis	65	2	0	0	0	67

NO.	JENIS PENYAKIT	JENIS HEWAN					JUMLAH TOTAL
		KUCING	ANJING	DOMBA/ KAMBING	SAPI	LAINNYA	
8	FIP indikasi	10	0	0	0	0	10
9	FLUTD	12	0	0	0	0	12
10	gastritis	33	1	0	0	0	34
11	keracunan	5	0	0	0	0	5
12	konjungtivitis	24	0	0	0	1	25
13	kontrol kesehatan	14	2	10	0	1	27
14	lipoma	0	0	0	0	1	1
15	luka bernanah abses	0	0	0	0	1	1
16	otitis externa	19	0	0	0	0	19
17	rhinitis	156	1	1	0	0	158
18	scabies	265	5	0	0	0	270
19	vulnus	31	0	1	0	1	33
20	anorexia	16	0	0	0	0	16
21	helminthiasis	1	0	4	0	0	5
22	pneumonia	2	0	0	0	0	2
23	tympani	0	0	1	0	0	1
24	infestasi kutu	8	0	0	0	0	8
25	febris	25	0	0	0	0	25
26	USG	10	0	8	0	0	18
27	syaraf	1	0	0	0	0	1
28	sariawan	2	0	0	0	0	2
29	PMK	0	0	0	225	0	225
30	LSD	0	0	0	14	0	14
31	Bovine Ephemeral Fever	0	0	0	81	0	81
32	Babesiosis	0	0	0	1	0	1
33	Avian Influenza	0	0	0	0	330	330
34	Fraktur	5	0	1	0	0	6
35	Mastitis	0	0	2	0	0	2
36	Distokia	2	0	0	0	0	2
37	Endometritis	4	0	0	0	0	4
38	FPV	1	0	0	0	0	1
39	Fraktur	0	0	1	0	0	1

NO.	JENIS PENYAKIT	JENIS HEWAN					JUMLAH TOTAL
		KUCING	ANJING	DOMBA/ KAMBING	SAPI	LAINNYA	
40	Gingivitis	1	0	0	0	0	1
41	Stomatitis	1	0	0	0	0	1
42	Dehidrasi	2	0	0	0	0	2
43	Chlamydia	1	0	0	0	0	1
44	calici virus	1	0	0	0	0	1
45	hipocalcemia	0	0	1	0	0	1
46	infeksi saluran kencing	2	1	0	0	0	3
47	vaksinasi	2	0	0	0	0	2
48	atresia ani	0	0	1	0	0	1
49	hepatitis	2	0	0	0	0	2
50	Konstipasi	2	0	0	0	0	2
51	ND	0	0	0	0	1	1
52	Pink eye	0	0	2	0	0	2
53	Prolaps	5	0	0	0	0	5
54	Gatal	1	0	0	0	0	1
55	Hernia inguinal	0	1	0	0	0	1
56	Panleukopenia	1	0	0	0	0	1
JUMLAH TOTAL		1606					
JUMLAH TERTANGANI		1597					
PRESENTASE TERTANGANI		99,44					

2. Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat

Indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Produk Olahan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Syarat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Indikator ini menjadi sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, serta kepercayaan terhadap produk pangan lokal.

Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat merupakan salah satu indikator pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Kesmavet merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk hewan, kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan.

Kesmavet sebagai salah satu unsur dari urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia melalui hewan dan/atau produk hewan adalah penyakit hewan yang masuk dalam kategori zoonosis.

Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan seperti daging, lemak, darah, susu, telur, enzim, dan sebagainya.

Bahan asal hewan (disingkat BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, termasuk diantaranya daging, susu, telur, bulu, tanduk, kulit, tulang, dan mani.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan bertujuan untuk menjamin kesehatan produk hewan dan bahan asal hewan sehingga terbebas dari penyakit yang dapat ditularkan melalui produk hewan/*food borne disease*. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.50

Realisasi Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat Tahun 2020- 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	84,298	82,96	100	82,1	82,41	79,75

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pengawasan produk hewan tahun 2025 sebesar sebesar 100% (target 75%). Capaian indikator ini menunjukkan sejauh mana kegiatan

pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelaku usaha mampu meningkatkan jumlah produk yang memenuhi standar keamanan pangan, seperti bebas dari bahan berbahaya, memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, serta memiliki izin edar yang sah.

Penjaminan produk hewan dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran produk hewan dengan kegiatan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to table*).

Penjaminan higiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan keamanan pangan. Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*food borne disease*) atau menggunakan produk hewan dengan mengendalikan resiko produk hewan dalam proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta resiko produk hewan yang tidak halal bagi yang dipersyaratkan.

Pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel yang dilakukan secara uji petik (karena keterbatasan anggaran). Ke depan perlu perencanaan dan pendanaan yang memadai jika ingin mewujudkan peta penyakit hewan yang ideal dengan sampling di 20 kecamatan secara merata untuk mengetahui keASUHAN (Aman, sehat, Utuh dan Halal) dari bahan pangan asal hewan. Hasil pemeriksaan sampel organ hati sapi terhadap keberadaan cacing hati di Rumah Potong Hewan (RPH) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 Sampel Organ Hati

Lokasi	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil Pemeriksaan	
			Cacing Hati	Penyakit Lainnya
RPH Temanggung	Hati	1601	362	164
RPH Parakan	Hati	187	24	32
Total	Hati	1788	386	196

Hasil pemeriksaan postmortem/setelah dipotong yang dilakukan di RPH Parakan dan Temanggung pada Triwulan IV tahun 2025 terhadap sampel organ hatinya adalah dari total pemotongan sebanyak 1788 ekor, hasil pemeriksaan hatinya ditemukan sebanyak 362 buah ditemukan kasus cacing hati. Persentase kasus cacing hati dari sapi yang dipotong di RPH adalah 21,59%. Sedangkan presentase kasus penyakit lainnya sebanyak 10,96%.

Presentase produk hewan yang memenuhi syarat sebanyak 78,41%. Hati yang mengandung cacing hati diafkir dan tidak boleh dikonsumsi karena bisa membahayakan kesehatan.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian indikator antara lain intensitas pengawasan yang semakin meningkat, ketersediaan tenaga pengawas yang kompete seperti petugas veteriner dan pengawas keamanan pangan yang memiliki kapasitas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian, peningkatan kesadaran pelaku usaha seiring dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait hygiene, sanitasi, serta standar keamanan pangan.

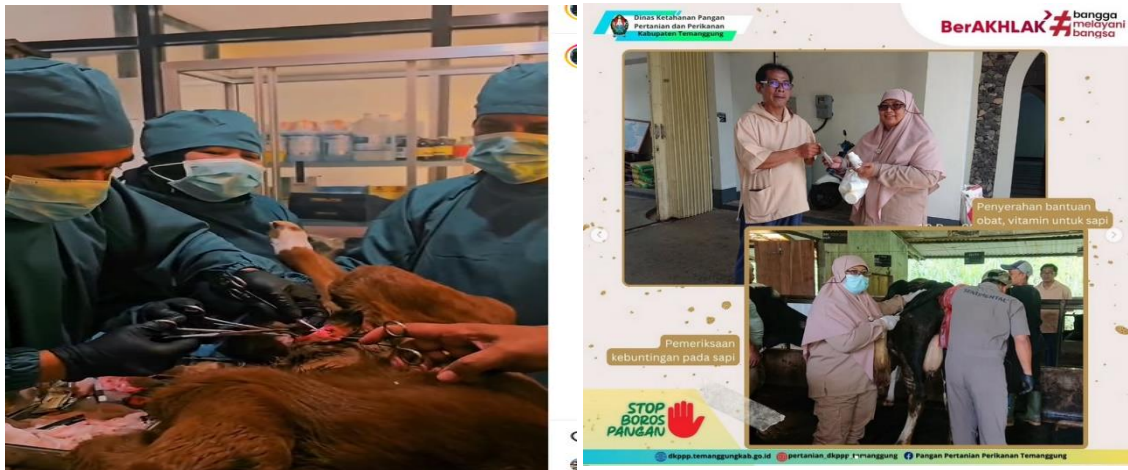
Adapun faktor-faktor yang menghambat pencapaian indikator antara lain keterbatasan jumlah dan jangkauan petugas pengawas, sehingga belum seluruh wilayah dan pelaku usaha dapat terpantau secara optimal, masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terutama skala kecil dan rumah tangga, terhadap standar keamanan pangan. keterbatasan sarana dan prasarana pengujian termasuk fasilitas laboratorium yang belum merata dan keterbatasan alat uji cepat

di lapangan, tingginya peredaran produk tanpa izin edar (terutama di pasar tradisional yang sulit dikendalikan secara menyeluruh), kurangnya kesadaran konsumen yang masih membeli produk tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator, dilakukan berbagai upaya strategis, antara lain peningkatan intensitas dan cakupan pengawasan, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas pengawas, penguatan sarana dan prasarana pengujian termasuk penyediaan alat uji cepat (rapid test) dan peningkatan kapasitas laboratorium, pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penerapan higiene sanitasi, Good Manufacturing Practices (GMP), dan perizinan usaha, edukasi kepada masyarakat/ konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk yang aman dan layak konsumsi, penguatan koordinasi lintas sektor, dengan instansi terkait dalam pengawasan pangan asal hewan secara terpadu.

Dengan pelaksanaan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung terciptanya sistem peternakan yang sehat, aman, dan berkelanjutan serta memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat sebagai konsumen produk peternakan.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 456.674.800 dengan realisasi Rp 455.816.913 (99,81%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 857.887 atau 0.19%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,81% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0.19%.



Gambar 3.17.

Kegiatan vaksin, pemeriksaan kesehatan hewan, penyerahan bantuan obat dan vitamin untuk sapi serta pengawasan produk asal hewan

b.1.12 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian serta meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai risiko bencana pertanian. Pada indikator ini dititik beratkan pada bencana pertanian berupa serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan iklim yang berpotensi menurunkan produktivitas dan pendapatan petani. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, pengendalian, serta penanganan dampak bencana pertanian secara cepat dan terkoordinasi.

Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian, yang menggambarkan tingkat pelayanan dan dukungan pemerintah kepada petani atau kelompok tani dalam melakukan pengendalian terhadap potensi maupun kejadian bencana pertanian. Fasilitasi tersebut dapat berupa penyediaan sarana pengendalian, pendampingan teknis, kegiatan monitoring dan pengamatan lapangan, serta pemberian rekomendasi teknis dalam penanganan bencana pertanian.

Indikator persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian dihitung dari Jumlah luasan yang tertangani melalui gerakan

pengendalian OPT di bagi luas terpapar yang melaporkan x 100%.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Tahun 2025

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2024 (%)	Tahun2025			Resntra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian kinerja s/d tahun 2025 (%)
1	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	100	75	94,32	100	87	94,32	100
	Rata-rata capaian kinerja indikator program		100			100			100

Sumber: DKPPP Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat ketahui bahwa Tahun 2025 capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100% (dengan luas cakupan pengendalian 705,45 ha dari total luas hamparan lokasi yang terpapar seluas 747,95 hektar. Gerakan pengendalian dilakukan secara swadaya, kerjasama dengan kelompok dan kerjasama dengan laboratorium hama provinsi. Dibanding capaian kinerja pada tahun sebelumnya konsisten sebesar 100, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan dukungan kepada petani dalam mengantisipasi dan mengendalikan dampak bencana pertanian sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan. Melalui fasilitasi yang dilakukan, petani memperoleh akses terhadap informasi teknis, sarana pengendalian, serta pendampingan dalam menerapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi pertanian serta meningkatkan ketahanan usaha tani terhadap berbagai risiko bencana.

Tabel 3.53

Tabel Realisasi Persentase Pengendalian Bencana pertanian Tahun 2020-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pengendalian bencana pertanian	%	NA	41,2	41,45	40,62	99,23	94.32

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah melaksanakan pengendalian serangan OPT baik secara fisik/mekanik, biologis, penyuluhan tentang pengendalian hama penyakit tanaman, pengamatan dini terhadap setrangan OPT dilakukan secara teratur sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, gerakan pengendalian hama penyakit semua komoditas pertanian dilakukan secara swadaya serta kolaborasi kelompok tani, laboratorium hama penyakit tanaman Kedu, POPT dan PPL, fasilitasi bantuan sarpras pengendalian OPT kepada kelompok, fasilitasi AOTP (asuransi usaha tani padi), pelatihan pembuatan pestisida nabati dan ramah lingkungan, mitigasi pengendalian OPT, perbanyak APH- Refugia, Gerakan pembuatan rumah burung hantu.

Pengendalian bencana pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendorongnya antara lain keberadaan sistem peringatan dini yang mampu membantu petani mengantisipasi potensi bencana, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau kondisi lahan secara lebih akurat. Pengembangan varietas tanaman tahan bencana, penerapan praktik pertanian yang baik, serta kerja sama antara petani, pemerintah, dan stakeholder turut memperkuat ketahanan sektor pertanian. Dukungan infrastruktur pertanian yang memadai serta pendidikan dan pelatihan bagi petani juga berperan dalam meningkatkan kemampuan menghadapi bencana.

Di sisi lain, pengendalian bencana pertanian masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya,

minimnya informasi potensi bencana, dan infrastruktur yang belum memadai. Tingginya ketergantungan pada kondisi alam serta kurangnya koordinasi antar pihak juga mengurangi efektivitas penanganan bencana. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan intensitas bencana semakin menambah tantangan di lapangan.

Untuk meningkatkan capaian fasilitasi pengendalian bencana pertanian, diperlukan berbagai upaya strategis, antara lain pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi pemantauan, dan pengembangan varietas tanaman tahan bencana. Penerapan praktik pertanian yang baik, pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan, serta peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan menjadi langkah penting yang harus diperkuat. Kerja sama antara petani, pemerintah, dan stakeholder perlu terus didorong, termasuk pengembangan asuransi pertanian sebagai perlindungan ekonomi bagi petani dalam menghadapi risiko bencana. Dengan langkah-langkah tersebut, pengendalian bencana pertanian diharapkan semakin optimal dan mampu mendukung keberlanjutan produksi pertanian.

Melaksanakan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, khususnya petani. Melalui program ini, petani memperoleh dukungan teknis dan fasilitasi dalam mengendalikan potensi bencana yang dapat mengganggu kegiatan usaha tani. Hal tersebut berkontribusi terhadap penurunan risiko kerugian usaha tani, peningkatan stabilitas produksi pertanian, serta terjaganya ketahanan pangan daerah.

Selain itu, kegiatan pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan juga meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan iklim. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam penanganan bencana pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kemandirian petani dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 0 dengan realisasi Rp 0. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 0% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 100%. Program ini lebih banyak di support adari APBN.



Gambar 3.18. Gerdal OPT Tanaman Hortikultura

b.1.13 Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian, khususnya petani dan kelompok tani, dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan penyuluhan, petani didorong untuk mengadopsi inovasi teknologi pertanian, meningkatkan kemampuan manajerial usaha tani, serta memperkuat kelembagaan kelompok tani sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan usaha bersama.

Keberhasilan program ini diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi

Indikator persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi mencerminkan tingkat adopsi inovasi teknologi pertanian oleh kelompok tani dalam kegiatan usaha tani. Teknologi yang dimaksud dapat berupa teknologi budidaya, penggunaan varietas unggul, pengelolaan hama dan penyakit tanaman, teknologi pemupukan berimbang, serta pemanfaatan alat dan mesin

pertanian. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi oleh kelompok tani, maka semakin besar peluang peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta kemampuan petani dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian.

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2024 (%)	Target 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian kinerja/d tahun 2025(%)
1	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	na	58	61,88	100	58	61.88	100
	Rata -rata capaian kinerja indikator kinerja program		100			100			100

Tabel 3.55

Realisasi Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	na	na	na	na	na	61,88

Tabel 3.56

Rekapitulasi Penilaian Penerapan Teknologi Modern Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH NILAI INDIKATOR PER KOMODITAS								NILAI AKHIR INDIKATOR
		PADI	JAGUNG	CABAI BESAR	CABAI RAWIT	BAWANG MERAH	BAWANG PUTIH	TEMPAKAU	KOPI	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BULU	0,47	0,44	0,86	0,86	0,67	0,67	0,80	0,91	0,71
2	TEMBARAK	0,68	0,56	0,73	0,76	0,46	0,48	0,68	0,26	0,58
3	TEMANGGUNG	0,69	0,67	0,77	0,75	0,60	0	0,76	0,45	0,67
4	PRINGSURAT	0,45	0,42	0	0,50	0	0	0,37	0,42	0,43
5	KALORAN	0,63	0,53	0,59	0,76	0	0	0,51	0,77	0,58
6	KANDANGAN	0,46	0,59	0,35	0,52	0	0	0,41	0,39	0,49
7	KEDU	0,52	0,63	0,49	0,59	0,67	0	0,90	0,49	0,61
8	PARAKAN	0,51	0,36	0,57	0,57	0,50	0,66	0,70	0,47	0,54
9	NGADIREJO	0,56	0,72	0,83	0,93	0,74	0,86	0,63	0,36	0,71
10	JUMO	0,42	0,66	0	0,67	0	0	0,48	0,56	0,56
11	TRETEP	0	0,67	0,94	0,94	0,92	1,00	0,91	0,63	0,86
12	CANDIROTO	0,62	0,40	0,41	0,53	0,56	0,67	0,65	0,97	0,60
13	KRANGGAN	0,56	0,50	0,08	0,65	0	0	0,35	0,50	0,53
14	TLOGOMULYO	0,59	0,55	0,67	0,69	0,83	0,67	0,93	0,47	0,67
15	SELOPAMPANG	0,76	0,69	0,59	0,60	0,63	0,59	0,56	0,37	0,60
16	BANSARI	0,52	0,63	0,53	0,70	0,64	0	0,66	0,56	0,61
17	KLEDUNG	0,60	0,35	0,99	1,00	0,41	0,92	0,51	0,19	0,62
18	BEJEN	0,56	0,58	0	0	0	0	0,91	0,91	0,68
19	WONOBOYO	0,42	0,44	0,69	0,73	0,61	0,59	0,62	0,59	0,59
20	GEMAWANG	0,58	1,01	1,00	0,96	0	0	0,33	0,75	0,77
	JUMLAH	10,59	11,39	11,08	13,72	8,25	7,10	11,75	11,03	
	RATA-RATA	0,56	0,57	0,65	0,72	0,63	0,65	0,62	0,55	0,62

$$\text{Penilaian Penerapan Teknologi Modern} = \frac{\text{jumlah Indikator per Komoditas}}{\text{jumlah Komoditas}} \times 100 \%$$

$$\text{Penilaian Penerapan Teknologi Modern} = \frac{4,95}{8} \times 100 \%$$

$$= 62 \%$$

Faktor pendorong tercapainya target kinerja antara lain:

1. Peran aktif penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan transfer teknologi kepada kelompok tani,
2. Adanya dukungan kebijakan dan program pemerintah dalam penguatan sistem penyuluhan pertanian,
3. Ketersediaan kelompok tani sebagai kelembagaan petani yang menjadi sasaran utama kegiatan penyuluhan,
4. Meningkatnya kesadaran petani terhadap pentingnya inovasi teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas usaha tani.

Rendahnya persentase kelompok tani yang telah menggunakan teknologi dipengaruhi oleh beberapa kendala utama, baik dari aspek sumber daya manusia, ekonomi, maupun kelembagaan, diantaranya

1. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani terhadap teknologi pertanian. Sebagian besar petani, khususnya pada kelompok usia lanjut, masih terbiasa dengan metode konvensional dan belum sepenuhnya memahami manfaat serta cara penggunaan teknologi modern.
2. Keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana teknologi. Alat dan mesin pertanian (alsintan), teknologi digital pertanian, maupun inovasi lainnya belum merata distribusinya.
3. Keterbatasan permodalan kelompok tani. Adopsi teknologi umumnya memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga kelompok tani dengan kapasitas ekonomi rendah cenderung enggan atau belum mampu mengadopsi teknologi tersebut.
4. Minimnya pendampingan dan penyuluhan. Intensitas penyuluhan yang belum optimal menyebabkan proses transfer teknologi berjalan lambat, sehingga adopsi inovasi di tingkat kelompok tani tidak berkembang secara signifikan
5. Rendahnya kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani yang belum aktif atau belum memiliki manajemen organisasi yang baik cenderung kurang responsif terhadap inovasi dan program pemerintah.

6. Keterbatasan jaringan informasi dan akses digital. Pemanfaatan teknologi berbasis digital masih terkendala oleh keterbatasan akses internet serta rendahnya literasi digital di kalangan petani.

Adapun upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan adalah

1. Peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan ini difokuskan pada pengenalan dan praktik langsung penggunaan teknologi pertanian, baik alsintan, teknologi budidaya, maupun digital farming, sehingga petani tidak hanya memahami tetapi juga mampu mengaplikasikan teknologi secara mandiri.
2. Penguatan peran penyuluh pertanian melalui peningkatan intensitas pendampingan di lapangan. Penyuluh diharapkan menjadi penghubung antara inovasi teknologi dengan petani, serta memastikan proses adopsi berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Penyediaan dan fasilitasi akses terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemerintah dapat memberikan bantuan, hibah, maupun skema pemanfaatan bersama (brigade alsintan) agar kelompok tani dapat menggunakan teknologi tanpa harus menanggung biaya besar secara individu.
4. Pengembangan demplot (demonstration plot) dan percontohan teknologi. Keberadaan lahan percontohan yang berhasil akan meningkatkan kepercayaan petani terhadap teknologi baru dan mempercepat proses adopsi.
5. Penguatan kelembagaan kelompok tani. Peningkatan kapasitas organisasi, manajemen kelompok, serta revitalisasi kelompok tani yang kurang aktif akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih terbuka terhadap inovasi.
6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital pertanian. Termasuk penggunaan aplikasi pertanian, sistem informasi pasar, dan platform digital lainnya, disertai peningkatan literasi digital bagi petani.

7. Penguatan kemitraan dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat diseminasi inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

2. Persentase kenaikan kelas kelompok tani.

Indikator Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas menggambarkan tingkat perkembangan dan kemandirian kelembagaan petani dari kelas pemula menuju madya, dan dari madya menuju utama. Kenaikan kelas kelompok tani mencerminkan peningkatan kapasitas organisasi, kemampuan manajerial, akses terhadap sumber daya, serta penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah daerah. Capaian indikator ini menunjukkan sejauh mana kelompok tani mampu berkembang menjadi kelembagaan ekonomi yang lebih kuat, profesional, dan berorientasi pasar. Semakin tinggi persentase kelompok tani yang naik kelas, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia petani serta daya saing sektor pertanian di daerah.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Program Penyuluhan Pertanian

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2024 (%)	Target 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir 2029	Realisasi 2025	Capaian kinerjas/d tahun 2025(%)
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	100	1,3	1,4	100	1,3	1,4	100
	Rata -rata capaian kinerja indikator kinerja program		100			100			100

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas/awal, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum.

Tahapan Kelas Kelompok Tani

- Pemula : Baru terbentuk, masih belajar organisasi.
Lanjut : Sudah ada kegiatan usaha tani bersama.
Madya : Mampu mengelola usaha tani secara kolektif, mulai orientasi pasar.
Utama : Mandiri, berbasis agribisnis, mampu bermitra dan berkontribusi pada ekspor.

Tahun 2025 sebanyak 45 kelompok (1,4%) dari total kelompok tani yang terdaftar 3205 (2737 kelompok tani, 468 KWT) yang naik kelas, dengan data capaian dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.58
Realisasi Persentase kelompok tani yang naik kelas
Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,678	0,81	1,03	0,98	1,4	1,4

Tabel 3.59
Jumlah Kelompok tani yang naik kelas Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	jumlah kelompok tani yang naik kelas	15	22	28	40	45	45

Tabel 5.59

Rekapitulasi Kelompok tani yang naik kelas Tahun 2025

REKAP KENAIKAN KELAS KELOMPOK TANI

WAKTU PENILAIAN : NOVEMBER 2025

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH TOTAL NILAI ASPEK					JUMLAH NILAI AKHIR INSTRUMEN 2025	JUMLAH NILAI AKHIR INSTRUMEN 2024	KELAS KELOMPOK TANI
				Kemampuan merencanakan	Kemampuan mengorganisasikan	Kemampuan melaksanakan kegiatan	Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan	Kemampuan mengembangkan kepemimpinan poktan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BULU	TEGALREJO	BUMI REJO III	46	34	90	37	55	262	257	LANJUT
2		PAKUREJO	JAYA MUKTI	47	40	95	30	35	247	187	LANJUT
3	TEBARAK	BOTO PUTIH	15.KEBON MAKMUR	75	53	111	12	31	282	123	LANJUT
4		KEMLOKO	19.BUMI MAKMUR	85	70	145	20	35	355	175	LANJUT
5	TEMANGGUNG	SIDOREJO	MAJU MAPAN	70	51	86	14	35	256	208	LANJUT
6		TLOGOREJO	KWT MEKAR TANI	59	40	93	23	32	247	201	LANJUT
7	PRINGSURAT	WONOKERSO	3. PAINGAN	65	46	95	10	30	246	232	LANJUT
8		KEBUMEN	8. MAKARTI	70	50	104	15	31	270	213	LANJUT
9		KLEPU	NGUDI MAKMUR	52	50	90	20	38	250	204	LANJUT
10	KALORAN	GANDON	SIDO MULYO IB	72	65	107	11	31	286	194	LANJUT
11		GEBLOK	KARYA TANI	77	43	185	53	62	420	379	LANJUT
12	KANDANGAN	MALEBO	DEWI SRI IVA	39	51	132	22	27	271	241	LANJUT
13		TLOGOPUCANG	MARGO UTOMO	72	52	122	30	40	316	166	LANJUT
14	KEDU	MOJOTENGAH	ANGULIR RAHARJO	40	70	86	20	30	246	201	LANJUT
15		CANDIMULYO	NGUDI REJEKI	30	60	110	20	30	250	108	LANJUT
16	PARAKAN	CAMPURSALAM	ADIL 01	38	44	116	13	35	246	240	LANJUT
17		CATURANOM	SIDO MULYO	81	104	26	12	24	247	224	LANJUT
18		GLAPANSARI	TUNAS BERLIAN	12	14	18	8	10	62	0	PEMULA
19	NGADIREJO	BANJARSARI	MARGO SUBUR IV	70	56	102	12	27	267	241	LANJUT
20		MANGUNSARI	MANGUN TANI	78	53	155	50	65	401	178	LANJUT
21		DILIMOYO	MULYO V	65	64	92	10	21	252	250	LANJUT
22	JUMO	JOMBOR	NGUDI MUKTI	28	147	166	22	75	438	434	LANJUT
23		KERTOSARI	TARUMARTANI IV	71	56	122	30	51	330	190	LANJUT
24	TRETEP	BONJOR	TUREN MAKMUR	80	75	115	20	30	320	243	LANJUT
25		SIGEDONG	RAHAYU SATU	35	58	119	9	32	253	240	LANJUT
26		NGLARANGAN	TARUNA TANI KARYA MUDHA	35	58	119	9	32	253	131	LANJUT
27	CANDIROTO	LEMPUYANG	MANUNGAL MAKMUR	68	50	104	12	35	269	150	LANJUT
28		SIDIHARJO	SIDO MAKMUR 1	67	49	105	11	31	263	123	LANJUT
29	KRANGGAN	PENDOWO	KARYA MAKMUR	72	53	109	11	31	276	199	LANJUT
30		KEMLOKO	KWT NGUDI MAKMUR	30	22	77	15	22	166	89	PEMULA
31		KEMLOKO	MARGO MULYO	45	40	100	20	25	230	222	PEMULA
32	TLOGOMULYO	LOSARI	TANI JAYA	50	45	60	40	60	255	240	LANJUT
33		TLOGOMULYO	HARAPAN DUJA	65	51	115	10	30	271	240	LANJUT
34	SELOPAMPANG	BUMIAYU	BUMI MAKMUR	135	98	225	50	50	558	254	MADYA
35		KACEPIT	BAROKAH	65	55	100	10	25	255	215	LANJUT
36	BANSARI	TLOGOWERO	KT. MBANYU MILI	55	62	75	30	45	267	202	LANJUT
37		REJOSARI	SEMBODO TANI	50	62	51	50	35	248	158	LANJUT
38	KLEDUNG	BATURSARI	MITRA SUMBING	50	60	85	20	37	252	240	LANJUT
39		PETARANGAN	MAKMUR SEJAHTERA	55	51	86	20	36	248	202	LANJUT
40	BEJEN	TANJUNGSARI	LANCAR	51	50	100	26	39	266	256	LANJUT
41		DUREN	MAJU MANDIRI	50	45	100	25	36	256	249	LANJUT
42	WONOBOYO	REJOSARI	MITRA MUDA	42	46	126	10	30	254	203	LANJUT
43		PITROSARI	KWT PANDAN ARUM	35	46	126	12	35	254	174	LANJUT
44	GEMAWANG	KREMPONG	MARGO MULYO	67	45	95	11	33	251	134	LANJUT
45		SUCEN	KWT SARI TANI	66	48	96	13	31	254	162	LANJUT

$$\text{Prosentase Kenaikan Kelas Kelompok} = \frac{\text{Jumlah Kelompok yang Naik Kelas}}{\text{Jumlah semua Kelompok}} \times 100\%$$

$$\text{Prosentase Kenaikan Kelas Kelompok} = \frac{45}{3255} \times 100\% = 1,38\%$$

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelompok tani diantaranya adalah :

1. Intensitas pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian yang berkelanjutan, sehingga kelompok tani mendapatkan arahan dalam pengelolaan organisasi dan usaha tani.
2. Akses terhadap program pemerintah, seperti bantuan sarana produksi, alsintan, serta kegiatan pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas kelompok.

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang aktif dan inovatif dalam kelompok tani, terutama pengurus yang memiliki komitmen dan kemampuan manajerial.
4. Penerapan teknologi pertanian dan inovasi usaha tani, yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.
5. Terjalannya kemitraan usaha, baik dengan pelaku usaha, koperasi, maupun lembaga keuangan, yang memperkuat posisi kelompok tani dalam rantai pasar.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menghambat kenaikan kelas kelompok tani, antara lain:

1. Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani, seperti lemahnya manajemen organisasi, administrasi, dan kepemimpinan.
2. Kurangnya partisipasi anggota kelompok, sehingga kegiatan kelompok tidak berjalan optimal dan cenderung pasif.
3. Terbatasnya akses terhadap permodalan dan pasar, yang menghambat pengembangan usaha kelompok tani.
4. Minimnya inovasi dan adopsi teknologi, sehingga produktivitas dan nilai tambah usaha tani tidak mengalami peningkatan signifikan.
5. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, tanpa diimbangi dengan kemandirian usaha kelompok.
6. Belum optimalnya pendampingan penyuluh, baik dari sisi jumlah maupun intensitas kunjungan di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan persentase kelompok tani yang naik kelas, dilakukan berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani, melalui pelatihan manajemen organisasi, administrasi, dan kepemimpinan kelompok.
2. Peningkatan intensitas pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan kinerja kelompok.
3. Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan, seperti kredit usaha rakyat (kur) dan kemitraan dengan lembaga keuangan.
4. Pengembangan usaha agribisnis kelompok tani, agar tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pengolahan dan pemasaran hasil.
5. Mendorong penerapan inovasi dan teknologi pertanian, guna meningkatkan

produktivitas dan efisiensi usaha.

6. Penerapan sistem penilaian dan monitoring kelas kelompok tani secara berkala, untuk memastikan progres perkembangan kelompok secara terukur.

Kenaikan kelas kelompok tani bukan sekadar formalitas, tetapi proses pembinaan berkelanjutan: mulai dari legalitas, peningkatan kapasitas, penerapan teknologi, hingga penguatan usaha berbasis agribisnis. Dengan dukungan pemerintah dan akses pasar, kelompok tani dapat berkembang dari pemula menjadi utama, sehingga berkontribusi pada swasembada pangan. Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya petani. Melalui kegiatan penyuluhan, petani memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola usaha tani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok tani juga mendorong terbentuknya kerja sama antarpetani dalam mengelola usaha tani secara lebih terorganisir dan efisien.

Dalam jangka panjang, program ini berkontribusi terhadap **peningkatan pendapatan petani, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta penguatan ketahanan pangan daerah**. Dengan meningkatnya kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi dan mengelola kelembagaan kelompok tani, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang secara lebih maju, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai kinerja sasaran program didukung dengan anggaran sebesar Rp 3,447,520,000 dengan realisasi Rp 3,110,056,813 (90,21%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 337,463,187 (9,79%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 90,21% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 9,79%.



Gambar 3.19.

Rembug tani pada Kegiatan Sekolah Lapang

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKPPP pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 53.245.976.767 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 51.238.486.292 atau 96,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.60
Alokasi dan Realisasi anggaran DKPPP Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	25.302.824.240	24.221.479.394	95,73%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.189.452.959	22.323.894.464	96,27%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	10.455.135	99,57%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.628.000	37.607.188	99,94%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	5.997.500	99,96%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.960.000	48.626.000	99,32%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	21.330.723	85,32%
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	115.424.770	88,79%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.603.370.381	1.379.384.656	86,03%

11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.412.900	123.263.270	99,88%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.965.000	99,83%
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	119.635.688	99,70%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000	14.395.000	99,97%
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	300.000.000	245.676.500	81,89%
2.1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	300.000.000	245.676.500	81,89%
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000	245.676.500	81,89%
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	163.297.000	156.676.890	95,95%
3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	13.297.000	12.900.000	97,01%
3.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13.297.000	12.900.000	97,01%
3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	143.776.890	95,85%
3.1.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	143.776.890	95,85%
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.000.000	34.033.850	97,24%
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.033.850	97,24%
4.1.1	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.033.850	97,24%
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	247.023.670	246.627.661	99,84%
5.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	237.023.670	236.672.169	99,85%
5.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	237.023.670	236.672.169	99,85%
5.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	10.000.000	9.955.492	99,55%
5.2.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.955.492	99,55%
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.641.500	7.538.855	98,66%

6.1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	7.641.500	7.538.855	98,66%
6.1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.641.500	7.538.855	98,66%
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.273.173.157	17.811.236.714	97,47%
7.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13.228.997.807	12.792.585.317	96,70%
7.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12.089.513.607	11.728.243.867	97,01%
7.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.776.984.200	1.064.341.450	59,90%
7.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5.044.175.350	5.018.651.397	99,49%
7.2.1	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5.034.175.350	5.008.731.747	99,49%
7.2.2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	10.000.000	9.919.650	99,20%
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.983.647.400	4.949.342.702	99,31%
8.1	Pengembangan Prasarana Pertanian	284.875.400	279.411.250	98,08%
8.1.1	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	284.875.400	279.411.250	98,08%
8.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	848.260.000	839.879.323	99,01%
8.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.800.000	996.955.188	99,62%
8.1.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	193.000.000	191.985.650	99,47%
8.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.651.740.000	2.636.512.621	99,43%
8.1.6	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	4.972.000	4.598.670	92,49%
9	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	458.449.800	455.816.913	99,43%
9.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	59.269.800	57.759.456	97,45%
9.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.724.800	57.759.456	96,71%
9.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	398.725.000	398.057.457	99,83%

9.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	398.725.000	398.057.457	99,83%
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.447.520.000	3.110.056.813	90,21%
10.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.447.520.000	3.110.056.813	90,21%
10.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.800.000.000	2.489.136.813	88,90%
10.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	647.520.000	620.920.000	95,89%

2. Analisa Efisiensi

Tabel 3.61 Analisa Efisiensi

No	Sasaran Program	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1.	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0	98,63	98,63	Disupport kegiatan APBN, APBD I
2.	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	81,89	100	18,11	Disupport kegiatan APBN
3.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	95,95	100	4,05	Disupport kegiatan APBN, APBD I
4.	Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	97,24	93,10	-4,14	Disupport kegiatan APBN
5.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
6.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	99,84	100	0,16	Disupport kegiatan APBN
7.	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
8.	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	98,66	100	1,34	Disupport kegiatan APBN
9.	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	97,47	98,04	0,57	Disupport kegiatan APBN, APBD I
10.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	99,31	100	0,69	Disupport kegiatan APBN, APBD I
11.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	99,43	100	0,57	Disupport kegiatan APBN, APBD I
12.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
13.	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	90,21	100	8,79	





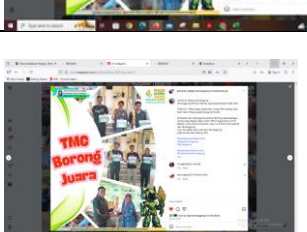
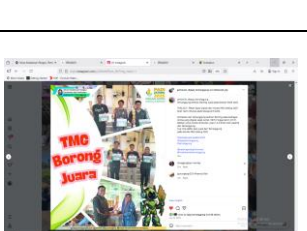

14.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	95,73	100	4,27	
	Rata-rata	96,22	99,26		







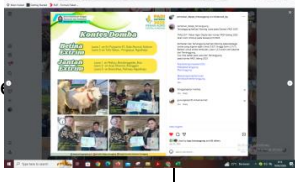
Rata-rata realisasi anggaran 96,22% dan rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 99,26% sehingga ada selisih efisien anggaran sebesar 3,78% dan efisiensi sumberdaya sebesar 3,04%. Tingginya efisiensi sumberdaya karena ada beberapa program yang tidak di support APBD II tetapi capaian kinerjanya 100 %, hal ini dikarenakan adanya support dari APBN dan APBD I berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan (hibah barang) dan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh dan petani.

3. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2025 penghargaan yang diperoleh yaitu :

No	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO	KETERANGAN
1	Juara 1 Kelompok Tani Komoditas Tembakau	Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah		Poktan Sindoro Makmur Desa Giripurno Kec. Ngadirejo
2	Kinerja Terbaik Pengelolaan Data Statistik Sektor	BPS Kab. Temanggung		DKPPP Temanggung
3	Juara 1 Lembutan Sawah	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Muh Nuri Desa Ngipik Pringsurat, Temanggung

4	Juara 2 Lembutan Sawah	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Darmanto Pringsurat, Temanggung
5	Juara 3 Lembutan Sawah	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Ashari, Morobungo, Jumo, Temanggung
6	Juara 1 Lembutan Tegal	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Arifin Desa Wonosari, Bulu, Temanggung
7	Juara 2 Lembutan Tegal	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Suryadi, Bansari, Bulu, Temanggung
8	Juara 3 Lembutan Tegal	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Setyo Bansari Bulu, Temanggung
9	Juara 1 Lembutan Gunung	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Yenas Renaldi, Wonosari Bulu, Temanggung
10	Juara 2 Lembutan Gunung	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Wahyu Tejo, Pagersari, Tlogomulyo, Temanggung

11	Juara 3 Lembutan Gunung	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Wahyu Tejo, Pagersari, Tlogomulyo, Temanggung
12	Juara 2 Stand Creatifity Kategori Lembutan	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		BPP Ngadirejo
13	Juara 2 Kategori Inovator OPD	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		DKPPP Temanggung
14	Juara 1 Kontes domba Betina Extrim	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		Eri Pujiyanto KT Sido Muncul Kaloran
15	Juara 2 Kontes domba Betina Extrim	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		Tofa Setya Pringapus Ngadirejo
16	Juara 1 Kontes Domba Jantan Extreme	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Wahyu Bandunggede, Kedu
17	Juara 2 Kontes Domba Jantan Extreme	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Arya Dharma Kranggan

18	Juara 3 Kontes Domba Jantan Extreme	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Bramditya, Petirejo, Ngadirejo
----	-------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

4. Inovasi

Inovasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2025 bekerjasama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi nasional) dalam pengembangan tanaman hortikultura komoditas Alpokat, cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih untuk peningkatan produksi dan pelepasan varioes unggul lokal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Tinjauan umum capaian kinerja berdasarkan hasil analisis LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung rata-rata capaiannya yaitu 86,41% kategori Tinggi;
2. Secara keseluruhan dari 5 (lima) capaian kinerja indikator sasaran, Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,26% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 96,22%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,04%.
3. Dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari sinergi seluruh program yang ada dan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

A. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, akses, dan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal serta penguatan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi inovatif, penyediaan sarana prasarana, serta penguatan hilirisasi dan nilai tambah produk.
3. Peningkatan kualitas dan regenerasi sumber daya manusia petani melalui penguatan penyuluhan, pelatihan, serta pengembangan petani milenial yang adaptif terhadap teknologi.
4. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan sistem peringatan dini

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 semoga menjadi bahan evaluasi untuk kinerja yang akan datang.

Temanggung, Maret 2026

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan
Perikanan Kab. Temanggung**



JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710630 199803 1 005

